



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



BIDANG STUDI:
DEMOGRAFI
TAHUN 2023

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



BIDANG STUDI DEMOGRAFI

TAHUN 2023

MATERI POKOK BS. DEMOGRAFI

Penulis : Tim Pokja Bahan Ajar BS. Demografi

1. Laksda TNI (Purn) Riyadi Syahardani, S.E.
2. drg. Sri Wahyuni Pujiastuti, M.M.
3. Laksda TNI (Purn) Dr. A. Yani Antariksa, S.E., S.H., M.B.A., M.M.
4. Dr. Sonny Harry B. Harmadi
5. Dr. Djoharis Lubis, M.Sc.
6. Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.
7. Drs. Edijan Tanjung, M.Si.
8. Dr. Panutan S. Sulendrakusuma, S.E., M.T., Akt.

ISBN : 978-602-73965-7-9

Cetakan : Tahun 2023

Penerbit : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat

Editor : Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit



**GOVERNOR
NATIONAL EDUCATION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA**

SAMBUTAN

Bahan Ajar (Hanjar) merupakan salah satu instrumen pokok dalam setiap pendidikan, seperti pendidikan di Lemhannas RI yang menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), serta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). Bahan yang disesuaikan dengan kurikulum PPRA, PPSA, dan P3DA ini diharapkan akan dapat menghasilkan kompetensi lulusan yang diinginkan. Oleh karenanya, penyediaan Hanjar dengan isi dan kualitas yang baik senantiasa menjadi perhatian yang utama bagi Lemhannas RI.

Dihadapkan pada dinamika tantangan dan kebutuhan kompetensi lulusan pendidikan, Lemhannas RI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Hanjar. Peningkatan kualitas ini dilakukan melalui kajian-kajian mendalam yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Hanjar yang ditunjuk, dengan melibatkan personel yang sesuai dengan kompetensinya di Bidang Studi (BS) masing-masing dan beranggotakan dari dalam maupun luar Lemhannas RI.

Melalui Hanjar Bin Gatra yang di dalamnya mencakup materi-materi BS. Geografi, BS. Demografi, BS. Sumber Kekayaan Alam, BS. Ideologi, BS. Politik, BS. Ekonomi, BS. Sosial Budaya, BS. Pertahanan dan Keamanan, BS. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta BS. Hukum dan HAM, diharapkan lulusan pendidikan Lemhannas RI di samping memiliki kompetensi menjadi pemimpin negarawan dan visioner juga menjadi pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan strategis. Sesungguhnya kompetensi inilah yang saat ini dan ke depan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, agar mampu mengelola kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era globalisasi persaingan antar bangsa-bangsa di dunia.

Akhirnya, saya selaku Gubernur Lemhannas RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim Pokja Penyusunan Hanjar ini. Semoga Hanjar ini dapat memperluas cakrawala pandang dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan peserta lulusan Lemhannas RI sebagaimana seperti yang diharapkan, serta bermanfaat bagi semua pihak, baik yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Lemhannas RI maupun masyarakat akademik lainnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta perlindungan kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Jakarta, Januari 2023

Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Andi Widjajanto

KATA PENGANTAR

DEPUTI PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan petunjuk dan rahmat-Nya, Kelompok Kerja (Pokja) Bin Gatra (terdiri dari BS. Geografi, BS. Demografi, BS. Sumber Kekayaan Alam, BS. Ideologi, BS. Politik, BS. Ekonomi, BS. Sosial Budaya, BS. Pertahanan dan Keamanan, BS. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta BS. Hukum dan HAM) telah menyusun Bahan Ajar (Hanjar) yang akan dipergunakan sebagai materi Hanjar bagi para peserta pendidikan yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI.

Hanjar Bin Gatra ini sebagai panduan bagi Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, Narasumber, Alumni Lemhannas RI dan para peserta pendidikan yang secara substansial telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, tujuan, dan sasaran pendidikan Lemhannas RI. Namun disadari, naskah ini belum sempurna sehingga diharapkan saran dan masukan dari para pembaca.

Akhirnya disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh Pokja Bin Gatra yang telah mencurahkan waktu dan pemikirannya dalam menyusun Hanjar ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Jakarta, Januari 2023

Deputi Pendidikan
Pimpinan Tingkat Nasional,



Andi Heru Wahyudi
Marsekal Muda TNI

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR LEMHANNAS RI	iii
KATA PENGANTAR DEPUTI PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL LEMHANNAS RI	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Umum	1
2. Demografi dan Studi Kependudukan	7
3. Sejarah dan Perkembangan Demografi	10
4. Sejarah Pertumbuhan Penduduk Dunia	12
5. Sejarah Kependudukan di Indonesia	13

BAB II KONSEP DEMOGRAFI	19
6. Fertilitas	19
7. Migrasi	22
8. Komposisi dan Persebaran Penduduk	26
9. Perkawinan dan Perceraian	29
10. Keluarga Berencana	30
11. Ketenagakerjaan	31
12. Sumber Data Kependudukan	32
13. Urbanisasi dan Kemakmuran di Masa Depan	33

BAB III SUBSTANSI MATERI DEMOGRAFI	37
14. Kebijakan Pembangunan Kependudukan	37
15. Pembangunan Berwawasan Kependudukan	40
16. Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	41

17.	Permasalahan dan Tantangan	55
18.	<i>Roadmap</i> Pembangunan Kependudukan	66
BAB IV PERAN DEMOGRAFI DALAM KETAHANAN NASIONAL		73
19.	Umum	73
20.	Gatra Geografi	74
21.	Gatra Demografi	75
22.	Gatra Sumber Kekayaan Alam	77
23.	Gatra Ideologi	79
24.	Gatra Politik	81
25.	Gatra Ekonomi	82
26.	Gatra Sosial Budaya	83
27.	Gatra Pertahanan Keamanan	85
BAB V KETERKAITAN DEMOGRAFI DENGAN BIDANG STUDI LAINNYA ...		87
28.	Demografi dengan Wawasan Nusantara	87
29.	Demografi dengan Ketahanan Nasional	87
30.	Demografi dengan Kewaspadaan Nasional	88
31.	Demografi dengan Sistem Manajemen Nasional	89
32.	Demografi dengan Kepemimpinan Nasional	91
33.	Demografi dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia	92
34.	Demografi dengan Pengaruh Lingkungan Global	93
35.	Demografi dengan Pengaruh Lingkungan Regional	95
BAB VI PENUTUP		97
DAFTAR PUSTAKA		99

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Bahan ajar (Hanjar) ini tidak bermaksud membuat peserta didik Lemhannas menjadi seorang demografer atau ahli kependudukan, tetapi memberi wawasan dan pemahaman dasar mengapa demografi menjadi salah satu dari aspek kehidupan (Trigatra) alamiah yang sangat penting dalam Ketahanan Nasional (Tannas). Dengan mempelajari demografi dan kependudukan, seorang pengambil kebijakan diharapkan dapat menggunakan pemahamannya untuk mengambil keputusan secara lebih baik. Dalam Undang-Undang (UU) No. 52 Tahun 2009, kependudukan didefinisikan sebagai hal ihwal yang terkait penduduk, sedangkan penduduk adalah orangnya.

Sebelum mempelajari lebih lanjut, Anda harus memahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara demografi dengan studi kependudukan. Terdapat banyak definisi yang membedakan keduanya. Pada dasarnya demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari penduduk dan karakteristiknya, lebih pada pengukuran-pengukuran secara statistik. Demografi lebih banyak membahas teknik pengukuran indikator kependudukan (Harmadi, 2016). Achille Guillard (1885) mendefinisikan demografi yang berasal dari kata "*demos*" (penduduk) dan "*grafein*" (gambaran) sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu berhubungan dengan keadaan manusia dan perubahannya. Pressat (1985) menjelaskan bahwa demografi ialah studi tentang populasi yang berhubungan dengan perubahan akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Sedangkan studi kependudukan membahas hubungan antara faktor-faktor perubahan penduduk dengan faktor-faktor lainnya dalam pembangunan (faktor nondemografis). Oleh karenanya, studi kependudukan lebih luas dari demografi.

Studi kependudukan dalam konteks Lemhannas maknanya ialah bagaimana kita menganalisis hubungan antara perubahan indikator kependudukan dengan Tannas. Di satu sisi, perubahan indikator kependudukan akan berpengaruh terhadap Tannas. Di sisi lain, kondisi Tannas akan berdampak terhadap indikator kependudukan. Sebagai contoh, ada kaitan erat antara pertumbuhan penduduk dengan Tannas. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin lemah Tannas. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan penduduk yang disebabkan tingginya angka kelahiran dapat berdampak buruk terhadap upaya peningkatan kesejahteraan nasional. Selain itu, tingginya pertumbuhan penduduk menciptakan persaingan yang tinggi di antara penduduk. Kompetisi dalam memperoleh pendidikan yang baik, kompetisi dalam meraih

pekerjaan, dan sebagainya. Kompetisi tersebut berpotensi menciptakan segregasi sosial, memicu konflik, dan pada gilirannya akan berdampak terhadap keamanan nasional.

Contoh lainnya, misalkan saja sebuah provinsi mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi. Setelah dianalisis lebih dalam secara demografi, diketahui bahwa sumber utama pertumbuhan penduduk tersebut ialah tingginya angka migrasi masuk. Dengan mengidentifikasi daerah asal migran dapat diketahui potensi masalah atau manfaat yang terjadi akibat migrasi masuk tersebut. Orang yang bermigrasi pada dasarnya tidak hanya membawa dirinya semata, tetapi juga keluarga dan seluruh kebiasaan, adat istiadat, maupun permasalahan kesehatan yang ada dalam dirinya. Adanya perbedaan kebiasaan, jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pertentangan di antara kelompok masyarakat. Namun jika dikelola dengan baik, migrasi masuk dapat berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

Dengan memperhatikan berbagai uraian di atas, kita dapat memahami bahwa sebenarnya studi demografi di Lemhannas lebih ditekankan pada studi kependudukan. Peserta diharapkan dapat menganalisis keterkaitan antara perubahan indikator kependudukan (demografi) dengan bidang lainnya (nondemografi). Oleh karenanya, sebagai pembuat kebijakan, Anda harus dapat memahami dengan baik gatra demografi, sehingga penyusunan kebijakan sesuai akar masalah, efektif, dan efisien. Bagaimanapun juga, tujuan akhir dari pembangunan nasional adalah penduduk itu sendiri. Pembangunan harus dapat dimaknai dari, oleh, dan untuk penduduk. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan, setiap strategi pembangunan didasarkan pada situasi penduduknya. Ibarat dalam sebuah peperangan, kita dapat memilih strategi yang tepat jika kita mengetahui dengan pasti jumlah pasukan kita dan musuh, struktur pasukan kita dan musuh, serta persebaran pasukan kita dan musuh. Demikian halnya dalam pembangunan nasional, strategi dan arah pembangunan nasional akan tepat jika kita memahami dengan baik ketiga aspek kehidupan (Trigatra) alamiah, salah satunya demografi.

Kita dapat belajar dari pengalaman sejarah kependudukan Indonesia, termasuk pemikiran Prof. Widjojo Nitisastro sebagai Bapak Kependudukan Indonesia. Pada tahun 1940-an, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan menurun. Walaupun saat itu tidak dilakukan Sensus Penduduk karena situasi perang, namun diperkirakan angka kematian lebih tinggi dibanding angka kelahiran. Namun setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949, euforia kemerdekaan terjadi. Para pemuda berbondong-bondong menikah dan memiliki anak. Tidak mengherankan pada tahun 1950-an terjadi *the first baby boom era in Indonesia*. Angka kelahiran saat itu tinggi. Pembangunan kesehatan mulai membaik sehingga usia harapan hidup penduduk perlahan meningkat. Jika membaca data tersebut, manfaat apa yang bisa kita ambil untuk penyusunan kebijakan? Dengan banyaknya jumlah penduduk yang lahir di tahun 1950-an, maka para “bayi” tersebut bersama-sama akan menjadi penduduk usia produktif dan siap menikah di awal 1970-an. Akan ada potensi *the second baby boom*

2 | DEMOGRAFI

in Indonesia. Jumlah kelahiran yang terlalu tinggi menyebabkan pertumbuhan perkapita melambat. Seperti yang disampaikan Prof. Widjojo, agar kesejahteraan meningkat dengan cepat, maka di awal pembangunan pemerintah harus menyusun strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Tidak mengherankan di tahun 1970 pemerintah saat itu melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dengan membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengantisipasi munculnya the *second baby boom*.

Perlu dipahami bahwa perubahan demografi dapat diperkirakan dengan baik oleh para demografer, melalui proyeksi penduduk, berdasarkan pemahaman teknik demografi untuk menghitung kelahiran, kematian, dan migrasi. Dengan menggunakan proyeksi penduduk, kita dapat memperkirakan situasi kependudukan di masa depan. Walaupun ada selisih antara angka proyeksi dengan angka aktual, jumlahnya tidak banyak. Oleh karenanya, melalui demografi kita dapat belajar dari masa depan (*learning from the future*). Saat 100 tahun merdeka (2045), Indonesia diproyeksikan memiliki jumlah penduduk sekitar 321 juta jiwa. Saat itu, jumlah lansia akan 8 kali lipat dibanding tahun 1971. Para lansia adalah mereka yang lahir tahun 1980 ke bawah dan jika diamati struktur pendidikan mereka saat ini didominasi lulusan SMP ke bawah. Dengan mengetahui situasi masa depan tersebut, pemerintah beserta para pemangku kepentingan saat ini dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sehingga dapat meminimalisir dampak negatif di masa depan.

Mempelajari studi kependudukan membutuhkan prasyarat pemahaman akan demografi. Meskipun tidak mendalam, Anda diharapkan dapat mengerti konsep dasar indikator-indikator demografi. Pada dasarnya, demografi mempelajari 3 faktor utama dinamika/perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiganya memengaruhi jumlah, pertumbuhan, struktur, dan distribusi penduduk. Kelahiran menjadi faktor penambah jumlah penduduk. Tingkat kelahiran juga memengaruhi struktur umur penduduk. Jika angka kelahiran tinggi maka umur median penduduk akan relatif muda, dan struktur umur penduduk didominasi usia muda. Kematian menjadi faktor pengurang jumlah penduduk, sedangkan migrasi terdiri dari migrasi masuk dan migrasi keluar. Dinamika penduduk sangat dipengaruhi ketiga faktor tersebut. Dalam demografi, teknik pengukuran/perhitungan ketiga faktor tersebut dijelaskan secara rinci. Jika kita memahami dengan baik cara pengukurannya, maka kita dapat menganalisis dengan baik pula keterhubungan antara variabel demografi dengan variabel nondemografi dalam studi kependudukan.

Sebagai contoh, misalnya untuk mengukur angka kelahiran digunakan indikator angka fertilitas total (*Total Fertility Rate/TFR*). Angka TFR tersebut diperoleh dari perhitungan *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* yang mengukur tingkat kelahiran pada setiap kelompok umur lima tahunan perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). Dari ASFR kita mengetahui kontribusi kelahiran terbesar berasal dari kelompok umur perempuan yang mana. Misalkan ternyata angka kelahiran terbesar berasal dari

kelompok perempuan umur 15-19 tahun. Ini menandakan bahwa jumlah perkawinan dan kehamilan di usia dini sangat tinggi. Dalam demografi, analisis kemungkinan hanya berhenti sampai di situ. Tetapi dalam studi kependudukan, penyebab tingginya kelahiran di usia remaja tersebut dapat dikaitkan dengan masalah putus sekolah dalam pendidikan, perilaku seks bebas di kalangan remaja, penyalahgunaan internet untuk pornografi, peraturan perundangan yang berlaku, kebiasaan/adat istiadat dan kepercayaan tertentu, maupun faktor lainnya. Jika permasalahannya pada putus sekolah, maka intervensi pendidikan dapat menurunkan TFR. Di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah tentu dapat menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan dan kehamilan remaja.

Jika mempelajari demografi formal tentu dibutuhkan waktu yang panjang, di tingkat pascasarjana setidaknya 2 semester. Sebagai Hanjar, buku ini berusaha seringkasan mungkin menyampaikan materi yang dapat dipelajari selama pendidikan di Lemhannas. Hal terpenting ialah bagaimana pemahaman demografi dan studi kependudukan yang Anda pelajari dapat dikaitkan dengan ketujuh gatra lainnya dan membantu Anda dalam mengambil keputusan sebagai kader pemimpin nasional.

Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peranan yang sangat penting, semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka semakin efektif dan efisien perencanaan pembangunan yang disusun. Untuk dapat memahami situasi kependudukan di suatu daerah atau negara, maka perlu memahami demografi sebagai suatu ilmu dan studi kependudukan sebagai pengetahuan multidisiplin.

Isu pertumbuhan penduduk merupakan topik yang layak diketahui para calon pimpinan tingkat nasional karena dua pertimbangan. *Pertama*, angka pertumbuhan penduduk nasional relatif masih tinggi. *Kedua*, ketidakmampuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk niscaya akan mengancam sektor pembangunan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Apalagi isu kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektoral, artinya persoalan itu tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu institusi saja. Penduduk juga merupakan modal dasar dalam pembangunan dan sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan pembangunan, karena penduduk selain sebagai objek pembangunan juga sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

Ada keterkaitan yang sangat erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk (Harmadi, 2016). Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin baik akan tercermin dalam produktivitas yang semakin tinggi. Tingginya kualitas SDM suatu bangsa berdampak pada tingginya produktivitas bangsa tersebut.

4 | DEMOGRAFI

Demikian pula sebaliknya bahwa suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk yang besar (tinggi), umur harapan hidup yang rendah, kualitas pelayanan sosial yang rendah, semuanya berdampak terhadap produktivitas bangsa yang semakin rendah. Kondisi yang demikian merupakan indikator bangsa tersebut masih dalam tahap berkembang bahkan mungkin juga termasuk kelompok bangsa yang terkebelakang.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan, mulai dari kelembagaan, kebijakan, ego sektoral para pemangku kepentingan, hingga kurang sadarnya masyarakat dalam berpartisipasi untuk menekan laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan pada gilirannya akan menimbulkan ledakan penduduk yang tinggi sehingga akan berdampak semakin menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, bila mampu mengelola pertumbuhan penduduknya sebagaimana yang diinginkan, maka pada saatnya nanti keberadaan penduduknya akan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional yang tentunya akan berdampak juga pada peningkatan Tannas.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (AS). Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir, penduduk bertambah 32,5 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 1,49%. Pertambahan ini setara jumlah penduduk Kanada, dan lebih banyak dari penduduk Malaysia maupun Australia. Jumlah penduduk yang besar tentu bukan perkara mudah untuk memenuhi seluruh kebutuhan penduduk. Sebanyak 22 juta dari 44 juta penduduk usia muda masuk pasar kerja tanpa keterampilan, bahkan sebagian besar hanyalah tamatan Sekolah Dasar (SD) sehingga lapangan kerja semakin sempit akibat meningkatnya usia produktif (15-64 tahun). Dengan demikian, angka pengangguranpun membengkak, kemiskinan di mana-mana, kriminalitas merajalela dan hancurnya tatanan sosial menjadi taruhannya.

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, pada tahun 2018 ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai angka 265 juta jiwa. Hal yang menarik bukan hanya soal jumlah penduduk, namun juga struktur umur penduduk. Sejak 2012 lalu, rasio ketergantungan Indonesia sudah di bawah angka 50 yang menandakan kita sudah masuk di era bonus demografi. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai lebih dari 66% dan akan terus menurun hingga di titik terendah pada periode 2028 hingga 2031.

Makna rasio ketergantungan di bawah 50 ialah bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang dari 50 orang penduduk usia nonproduktif. Usia nonproduktif terdiri dari anak-anak (0-14 tahun) dan lansia (65 tahun ke atas). Jika kondisi ini ditunjang oleh performa pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan peningkatan kapabilitas, utamanya pendidikan penduduk kelompok usia muda, dapat dipastikan Indonesia akan memetik manfaat dari bonus demografi.

Dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdampak pada pertumbuhan kesejahteraan. Pendapatan perkapita penduduk akan tinggi, bisa menembus lebih dari US\$ 20.000 pertahun. Permasalahannya adalah “bagaimana bonus demografi ini harus dipersiapkan oleh kita semua sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional dan Tannas”.

Salah satu hal yang seringkali dilupakan dalam era globalisasi yang sedang melanda dunia saat ini ialah terjadinya perubahan global dan bagaimana kita mengantisipasinya. Jika ditilik lebih jauh, sebenarnya ada satu kesempatan emas perubahan penting dalam perekonomian dunia di masa depan, yaitu perubahan struktur demografi. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk dunia usia 64 tahun ke atas pada tahun 2025 akan semakin meningkat seperti di Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan juga Thailand. Implikasi dari peningkatan penduduk lanjut usia ini akan membawa berbagai perubahan serius terhadap perekonomian negara-negara tersebut. Mereka sangat kekurangan penduduk usia produktif dan kebutuhan tenaga kerja akan didatangkan dari negara-negara yang mengalami surplus penduduk usia produktif.

Kita sangat menyadari bahwa peningkatan kualitas penduduk diawali dari 1.000 hari pertama kehidupan, sejak masa pembuahan (konsepsi) hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi ibu hamil, bayi, dan balita akan membentuk anak-anak berkualitas. Tahapan selanjutnya ialah pendidikan dan kesehatan. Untuk sektor pendidikan, konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurang 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh bagusya ialah restorasi Meiji satu setengah abad silam, di mana Jepang mengejar kemajuan Barat dan menimba ilmu dan pengetahuan modern, ribuan buku asing dari Amerika dan Eropa diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Jejak tersebut diikuti Korea Selatan. Cinapun menjadi maju karena sejak jauh hari mengirimkan anak-anak mereka sekolah ke Amerika.

Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia? Menarik untuk dilihat bahwa berdasarkan pergeseran demografi ini, Indonesia ternyata memiliki potensi untuk unggul di masa depan. Sementara negara-negara lain di dunia akan mengalami kesulitan akibat struktur demografinya yang berubah, Indonesia justru akan mendapatkan bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa ahli memperkirakan bonus demografi ini akan dicapai Indonesia sekitar tahun 2020-2030.

Untuk itu perlu adanya forum diskusi di kalangan calon pimpinan tingkat nasional, generasi muda/remaja saat ini yang pada 1 atau 3 dekade mendatang diharapkan akan menjadi tokoh nasional atau pemimpin bangsa. Pada saat itu diharapkan para tokoh atau pemimpin tersebut telah memiliki bekal wawasan yang

memadai tentang isu-isu strategis dan tantangan di bidang kependudukan, termasuk mengenai topik “Bonus Demografi” dan dampaknya terhadap Tannas.

2. Demografi dan Studi Kependudukan

Data dan statistik kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui gambaran sosial dan ekonomi penduduk di suatu negara. Dari segi ketenagakerjaan, keadaan penduduk dapat dilihat dari persentasenya menurut bidang pekerjaan utama (pertanian, industri, dan jasa), status pekerjaan (formal dan informal), atau jenis kegiatan (bekerja, sekolah atau mencari pekerjaan). Angka harapan hidup pada saat lahir, yang menunjukkan rata-rata lamanya hidup penduduk, sering kali dipakai untuk melihat peningkatan standar hidup.

Dari sudut perkembangan ilmu itu sendiri, statistik kependudukan memegang peranan penting. Penemuan-penemuan baru tentang apa yang terjadi secara empiris akan membentuk teori baru dan teori tersebut akan diuji lagi dengan penemuan data empiris yang terbaru dan demikian seterusnya.

Secara singkat, ilmu demografi sangat bermanfaat untuk:

- Mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu serta perubahan-perubahannya;
- Menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang;
- Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan;
- Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang.

a. Definisi Demografi

Demografi (*demography*) berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk dan “*grafein*” yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Istilah ini pertama kali dipakai oleh *Achille Guillard* pada tahun 1855 dalam karyanya yang berjudul *Ellements de Statistique Humaine, ou Demographie compare atau Ellements of Human Statistics or Comparative Demography*.

Pengertian tentang demografi berkembang seiring dengan perkembangan keadaan penduduk serta penggunaan statistik kependudukan yang dialami oleh para penulis kependudukan pada zamannya. Beberapa contoh tentang perkembangan pengertian demografi:

Johan Susmilch (1762, dalam Adioetomo, Sri M., 2011) berpendapat bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya.

Achille Guillard (1855) memberikan definisi demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualnya, dan kondisi moralnya.

United Nations (1958) dan *International Union for the Scientific Study of Population/IUSSP* (1982) mendefinisikan demografi sebagai studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi lebih ditekankan pada studi kuantitatif dari berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ketiga faktor itu biasanya disebut sebagai variabel demografi atau komponen pertumbuhan penduduk. Ketiga variabel demografi tersebut ditambah dengan faktor lain seperti perkawinan, perceraian, dan mobilitas sosial (perubahan status sosial) akan menentukan struktur atau komposisi penduduk.

Donald J. Bogue (1969) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial.

George W. Barclay (1970) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk. Demografi mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh bukan perorangan.

Dengan mengacu kepada definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta penghitungan secara matematik dan statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran dan komposisi/strukturnya. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang pada gilirannya menyebabkan perubahan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk. Demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok.

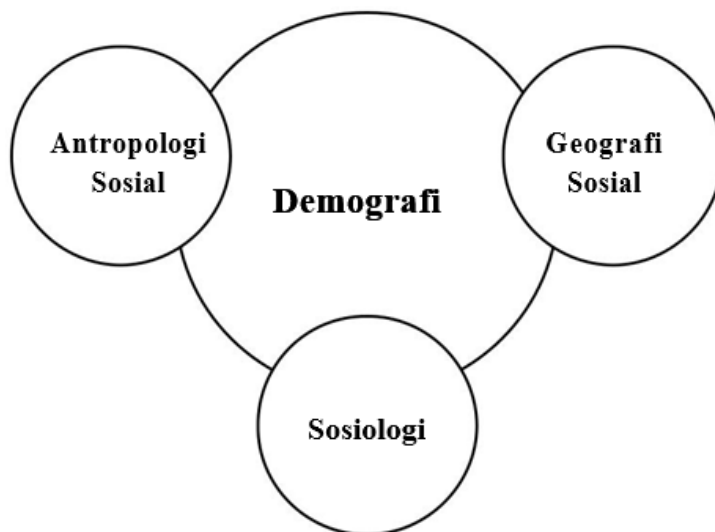
Batasan formal demografi telah pula diberikan oleh Hauser dan Ducan yang menyatakan demografi adalah studi mengenai jumlah, distribusi territorial, dan komposisi penduduk, perubahan-perubahan yang bertalian dengannya serta komponen-komponen yang menyebabkan perubahan bersangkutan dapat

diidentifikasi sebagai natalitas, mortalitas, gerak penduduk territorial, dan mobilitas sosial (perubahan status). Demografi dapat dilihat dalam makna yang sempit, dalam hal ini sama dengan analisis demografi atau dalam makna yang lebih luas mencakup baik analisis demografi maupun studi kependudukan.

Pemisahan antara studi kependudukan dan analisis demografi telah dilakukan oleh Hauser yang menyatakan bahwa:

- 1) Analisis demografi merupakan analisis statistik terhadap jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk serta komponen-komponen variasinya dan perubahan; sedangkan
- 2) Studi kependudukan mempersoalkan hubungan antara variabel demografi dan variabel dari sistem lain.

Demografi murni (*pure demography*) atau dapat juga disebut dengan demografi formal (*formal demography*) hanya mendeskripsikan atau menganalisis variabel-variabel demografi, sebagai contoh hubungan antara naik turunnya tingkat fertilitas dengan struktur demografi di suatu daerah. Kajian demografi biasanya diampu oleh ahli-ahli ilmu lain terutama ilmu-ilmu sosial (ilmu yang orientasi pembahasannya adalah manusia) seperti sosiologi, ekonomi, dan biologi. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis demografi untuk suatu wilayah sangat tergantung pada metode analisis ilmu yang mengampunya (lihat gambar 1). Namun demikian, demografi sebagai ilmu yang mempunyai metode tersendiri, terutama dalam mengukur maupun membuat estimasi variabel demografi baik untuk masa lampau, sekarang, dan masa mendatang.



Gambar 1.
Demografi dalam Kajian Ilmu-Ilmu Lain (terutama ilmu-ilmu sosial)

b. Studi Kependudukan

Studi kependudukan (*Population Studies*) merupakan istilah lain bagi ilmu kependudukan yang digunakan di sini. Studi kependudukan terdiri dari analisis-analisis yang bertujuan dan mencakup:

- 1) Memperoleh informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik, dan perubahan-perubahannya;
- 2) Menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut; dan
- 3) Menganalisis segala konsekuensi yang mungkin sekali terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan-perubahan itu.

Introduksi istilah ilmu kependudukan sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang lebih luas tentang demografi, karena sejumlah ahli telah menggunakan istilah demografi untuk menunjuk pada demografi formal, demografi murni, atau kadang-kadang demografi teoretis.

Studi kependudukan dapat pula dilihat sebagai penelitian makro demografi dan mikro demografi. Penelitian makro demografi mencakup penelitian unit skala besar, agregat orang dengan keseluruhan sistem kebudayaan dari masyarakat. Sasaran ruang lingkup daerah penelitian makro demografi adalah benua, bangsa, dan kesatuan-kesatuan wilayah yang luas seperti provinsi dan kota-kota besar. Sedangkan penelitian mikro demografi memusatkan diri atas individu, kesatuan-kesatuan keluarga *autonomous*, kelompok-kelompok kecil, dan lingkungan ketetangaan. Penelitian mikro demografi berlangsung pada tingkat luas wilayah yang relatif kecil seperti di suatu desa di Indonesia.

3. Sejarah dan Perkembangan Demografi

Menurut sejarahnya, upaya-upaya untuk pencatatan statistik kependudukan sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu, meskipun masih dilakukan dalam ruang lingkup yang kecil dan digunakan secara terbatas. John Graunt (1620-1674) seorang warga negara Inggris, dikenal sebagai pelopor dalam bidang pencatatan statistik penduduk. Bukunya yang berjudul *Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index and Made Upon the Bills of Mortality* (Graunt, 1662 dalam Iskandar, 1994) sebagian besar berisi analisis mortalitas dan selebihnya mengenai fertilitas, migrasi, perumahan, data keluarga, perbedaan antara kota dan negara, dan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok umur militer. Data yang digunakan dalam analisis kematian dan kelahiran tersebut bersumber dari catatan kematian (*The Bills of Mortality*) yang diterbitkan secara berkala oleh petugas

gereja setiap minggu. Dari hasil penelitiannya itu, Graunt mencetuskan “hukum-hukum” pertumbuhan penduduk.

Graunt menyarankan agar penelitian yang menyangkut penduduk lebih menekankan aspek komposisi penduduk menurut jenis kelamin, negara, umur, agama, dan sebagainya. Keistimewaan dari pendekatan yang dipergunakan oleh Graunt adalah kehati-hatiannya dan kekritisannya dalam pengumpulan data. Apabila informasi yang ada dirasakan terlalu sedikit, maka Graunt mengambil sampel untuk melakukan estimasi. Ia melakukan penelitian empiris terhadap jumlah dan perkembangan penduduk London pada masa itu. Dari usaha Graunt dalam bidang kependudukan yang mencakup topik-topik yang menarik dapat dikatakan bahwa ilmu demografi lahir pada zamannya. Oleh karena itu, Graunt dikenal pula sebagai Bapak Demografi.

Setelah era Graunt, perhatian publik terhadap masalah kependudukan baik mengenai pencatatan statistik maupun pertumbuhannya terus meningkat. Dalam sejarah perkembangan ilmu demografi, timbul masalah mengenai pembagian cabang ilmu ini. Awalnya, para pengamat berpendapat bahwa demografi lebih terfokus pada penyusunan statistik penduduk dan analisisnya. Pendapat ini memang dapat dimengerti karena pelopor-pelopor ilmu demografi, seperti Susmilch dan Guillard menganggap demografi sebagai *bio-social book-keeping*, yang artinya kelahiran sebagai faktor penambah jumlah penduduk, sedangkan kematian sebagai faktor pengurang jumlah penduduk. Kemudian beberapa pengamat membedakan masalah penduduk menjadi dua, yaitu yang bersifat kuantitatif yang membahas tentang jumlah, persebaran serta komposisi penduduk, dan yang bersifat kualitatif yang membahas masalah penduduk dari segi genetis dan biologis. Gagasan ini kurang mendapat dukungan karena ternyata keduanya mengandung unsur kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan pengertian dan sejarah perkembangan demografi, maka demografi saat ini tidak saja dipelajari secara murni, tetapi juga dipelajari secara lebih luas dengan mengindahkan variabel-variabel nondemografis (sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik). Dengan kata lain, demografi bukan lagi merupakan disiplin ilmu yang tersendiri, tetapi juga merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner.

Selain itu, dari perkembangan aplikasi demografi terutama dalam peranannya untuk menganalisis fenomena kependudukan, dapat dikatakan bahwa ilmu demografi sangat berguna sebagai instrumen atau alat analisis yang dapat dipakai untuk membedah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan kependudukan pada umumnya. Demografi berperan sebagai alat analisis (*tools of analysis*) dengan kemampuannya mengembangkan indikator-indikator kependudukan. Indikator kependudukan dapat dijadikan tolok ukur perbandingan keadaan demografi sekelompok penduduk tertentu dengan kelompok penduduk yang lain, atau perbandingan antarwaktu dalam analisis tren kependudukan. Hal ini sangat berguna, baik untuk memonitor kemajuan maupun memonitor hasil-hasil pembangunan sosial dan ekonomi.

4. Sejarah Pertumbuhan Penduduk Dunia

Pembahasan transisi demografi tidak terlepas dari persoalan pertumbuhan penduduk, oleh karena itu perlu kiranya mengetahui persoalan penduduk dan sejarah pertumbuhannya. Pada permulaan tahun Masehi, 1 AD, jumlah penduduk dunia diperkirakan masih sekitar 250 juta jiwa dengan angka pertumbuhan sekitar 0,04% pertahun. Tingkat pertumbuhan penduduk yang amat rendah ini bertahan dalam waktu yang cukup lama, berabad-abad dan kemudian terjadi suatu ledakan jumlah penduduk yang dimulai sebelum abad ke-18. Pada permulaan revolusi industri tahun 1750, jumlah penduduk dunia meningkat menjadi sekitar 790 juta.

Pada abad berikutnya, kemajuan teknologi di Eropa dan di beberapa belahan dunia lain mulai memperlihatkan dampaknya. Penemuan obat-obatan (seperti penisilin) dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan amat mengurangi berbagai penyakit. Selain itu, penemuan alat transportasi berdampak pada perluasan perdagangan yang membuat persediaan bahan pangan lebih mudah didapat dan pada gilirannya memperbaiki nutrisi penduduk. Tingkat kematian yang tinggi pada abad sebelumnya mulai menurun dan angka harapan hidup mulai meningkat secara perlahan-lahan. Sementara itu, angka fertilitas masih tetap tinggi sehingga selisih angka fertilitas dan angka kematian semakin besar. Sebagai akibatnya, terjadi ledakan jumlah penduduk yang amat cepat, mencapai 1,7 miliar pada permulaan tahun 1900 dan mencapai 2 miliar pada tahun 1930. Pada tahun 1950, jumlah ini telah bertambah menjadi 2,5 miliar. Jumlah ini genap mencapai 6 miliar pada tahun 1999 (Gelbard, Haub dan Kent, 1999). Satu tahun kemudian yaitu tahun 2000, penduduk dunia bertambah 55 juta jiwa atau menjadi 6.055 miliar, dan pada 31 Oktober 2011 sudah mencapai 7 miliar.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang cukup tajam ini menandai masuknya era modern dari sejarah demografi yang dinyatakan sebagai transisi demografi tahap kedua. Transisi demografi ini terjadi bersamaan dengan perubahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi modern. Perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat modern bersamaan dengan terjadinya industrialisasi dan urbanisasi dianggap mempunyai dampak pada perubahan perilaku demografi.

Di negara maju, tahap transisi demografi yang terjadi pada abad ke-20 mencapai titik kematangannya, yang ditandai dengan terjadinya penurunan angka kelahiran dan kematian sampai pada titik terendah. Pada masa setelah Perang Dunia II, angka pertumbuhan penduduk di negara-negara tersebut telah menunjukkan tanda-tanda mencapai di bawah angka 1%. Bahkan pada periode 1995-2000, angka pertumbuhan penduduk rata-rata untuk beberapa negara maju, seperti Swedia, Perancis, dan Jepang mencapai angka yang sangat rendah, masing-masing sebesar 0,11%, 0,37%, dan 0,25% pertahun, sementara Australia dan Singapura masih mempunyai angka pertumbuhan penduduk di atas 1%, yang disebabkan karena migrasi.

Sementara itu, negara-negara yang dikelompokkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedang, mempunyai pertumbuhan penduduk sekitar 1-2% pertahun, kecuali Cina yang telah mampu menurunkan angka pertumbuhan penduduk menjadi 0,88% pertahun. Sementara itu, negara-negara dengan IPM rendah masih harus berjuang menurunkan angka pertumbuhan penduduk yang masih berada di atas 2% pertahun (kecuali Zimbabwe).

5. Sejarah Kependudukan di Indonesia

Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Kedudukan keempat ini diperoleh setelah terjadi perubahan politik di Uni Soviet yang menyebabkan pecahnya negara itu.

Menurut sejarah, berdasarkan penemuan fosil manusia purba di Jawa, Indonesia diperkirakan sudah dihuni sejak zaman prasejarah. Berdasarkan penelitian mengenai bahasa, cara-cara dan peralatan pertanian diperkirakan pada masa tersebut telah terjadi migrasi penduduk dari Cina Selatan melalui Semenanjung Melayu ke pulau-pulau di Indonesia. Migrasi ini terjadi dua kali yaitu sekitar 3000 SM dan 300 SM. Migrasi yang lain ialah migrasi dari India yang masuk ke Indonesia dengan membawa kebudayaan Hindu.

Sejak zaman prasejarah sampai dengan zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, informasi yang jelas mengenai jumlah, komposisi, persebaran, dan perubahan-perubahan penduduk tidak ada, meskipun beberapa sumber menyebutkan bahwa pada saat itu sudah ada perhitungan jumlah penduduk melalui cacah (rumah tangga) untuk kepentingan kekuatan perang, informasi tersebut bersifat lokal dan tidak tercatat dengan jelas, sehingga data yang diperoleh hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan. Informasi kependudukan baru diperoleh pada masa pemerintah Belanda mulai berkuasa di Indonesia, yaitu kira-kira pada abad ke-17.

Informasi tersebut terbatas pada informasi penduduk di pulau Jawa yang dikumpulkan melalui berbagai catatan resmi dan tidak resmi, karena pengumpulan data masih sangat sederhana, mutu data yang dikumpulkan juga rendah. Hal ini menyebabkan data penduduk pulau Jawa saat itu diperoleh dari berbagai estimasi. Informasi kependudukan ini penting bagi Belanda untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pertanian dan kekuatan perang. Dengan demikian, sejarah kependudukan di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi empat periode yaitu periode sebelum pemerintahan Belanda, periode pemerintahan Belanda, periode perang kemerdekaan 1940-1950, dan periode kemerdekaan sampai dengan sekarang.

a. Periode sebelum Pemerintahan Belanda

Periode yang dimaksud yaitu periode kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, mulai dinasti Mataram Hindu sampai dengan Mataram Islam. Mc Donald (1980) memperkirakan jumlah penduduk pulau Jawa pada akhir masa kerajaan Mataram Hindu (abad ke-10) sebesar 5 juta jiwa. Perkiraan Mc Donald didasarkan pada perkiraan bahwa untuk waktu yang sangat lama, pertumbuhan penduduk di pulau Jawa mengalami kemandekan (stagnasi). Hal ini disebabkan oleh kemunduran pemerintahan, penurunan kontrol sosial, perang, epidemik penyakit, bencana banjir, dan letusan gunung berapi.

Dari berbagai temuan candi-candi di Jawa, tampak adanya pengelompokan candi pada daerah-daerah yang subur, seperti yang terdapat di Prambanan, Mendut, Borobudur, dan sekitarnya. Penemuan tersebut dapat digunakan sebagai pemusatan-pemusatan penduduk. Hal ini diperkuat dengan penemuan bekas-bekas desa di wilayah Kabupaten Klaten akhir-akhir ini. Hugo (1987) menyatakan bahwa pada abad ke-14 dan ke-15 (era Majapahit), Jawa dicirikan sebagai daerah dengan masyarakat yang sudah maju dalam pertanian dan irigasi, stabil dalam politik dan pemerintahan. Pada periode ini, migrasi penduduk antarpulau sudah dilakukan, seperti migrasi yang terjadi antara Kerajaan Mataram di Jawa dengan Sriwijaya di Sumatra. Migrasi terjadi karena adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, dan hubungan kekerabatan. Pepatah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa bahari terbukti dengan adanya perdagangan dengan negara-negara lain di luar Jawa melalui hubungan laut.

b. Periode Pemerintahan Belanda

Seperti negara-negara Asia lainnya, Indonesia tidak mempunyai informasi kependudukan yang jelas sampai pada masa pemerintahan Raffles (1815). Raffles menghitung penduduk melalui registrasi penduduk, dengan mencatat semua penduduk melalui kepala desa/dusun masing-masing melalui sistem sewa tanah. Sebelum masa itu, angka jumlah penduduk Indonesia hanya berdasarkan perkiraan semata-mata. Pada abad 19, sebagian investasi dan aktivitas pemerintah kolonial Belanda dipusatkan di pulau Jawa karena selain letaknya yang strategis, lahannya yang subur sangat menguntungkan bagi usaha pertanian dan perkebunan (Mohr 1938 dalam Mantra 1990). Pembangunan yang dilaksanakan di Jawa membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain angka pertumbuhan penduduk alami yang tinggi, banyak pula migran masuk ke pulau Jawa.

Peningkatan penduduk yang tinggi di pulau Jawa akhirnya dianggap serius oleh pemerintah, sehingga diambil kebijakan untuk memindahkan sebagian penduduk dari daerah padat di pulau Jawa ke pulau Sumatra. Kegiatan ini dikenal kolonisasi. Kolonisasi pertama dilakukan tahun 1905 dengan

memindahkan 105 petani dari Kedu ke Gedong Tataan di Lampung. Karena biaya kolonisasi dianggap tinggi, usaha pemerataan persebaran penduduk lebih ditekankan pada migrasi tenaga kerja ke perkebunan-perkebunan di Sumatra Timur (kuli kontrak). Proyek kolonisasi ini kemudian diteruskan oleh pemerintah Indonesia dengan nama transmigrasi. Keseriusan pemerintah dalam menangani transmigrasi ini terlihat dengan ditetapkannya Djawatan Transmigrasi tahun 1947 (sekarang Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transmigrasi.

c. Periode Perang Kemerdekaan (1940-1950)

Kondisi kependudukan paling parah terlihat pada periode ini, yaitu dimulai pada waktu Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Di bawah pemerintahan Jepang, kondisi perekonomian Indonesia sangat buruk. Beberapa jenis komoditas seperti tekstil, alat-alat pertanian, komoditas makanan pangan menghilang dari pasaran. Jepang mengambil alih semua jenis komoditas tersebut untuk menyokong pembiayaan angkatan perang mereka. Pada periode ini dilakukan mobilisasi tenaga kerja (Romusha) untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan dan proyek-proyek pertahanan tentara Jepang, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada masa ini tidak terdapat data mengenai berapa jumlah kematian para pekerja Romusha tersebut. Keyfitz dan Nitisastro (1962) memperkirakan bahwa angka kematian di antara pekerja tersebut tinggi, ini disebabkan karena kelaparan, penyakit, dan kemiskinan.

Sesudah kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945, keadaan Indonesia masih diliputi suasana perang untuk mempertahankan kemerdekaan (1947-1948). Pada masa ini terjadi migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan akibat pendudukan kota-kota besar oleh Belanda. Perang kemerdekaan tersebut menyebabkan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya angka kematian di Indonesia.

d. Periode Paska Perang Kemerdekaan

Walaupun perang kemerdekaan sudah berakhir tetapi keadaan politik di Indonesia belum stabil. Banyaknya pemberontakan PRRI/Permesta sampai dengan Komunis terus-menerus berlangsung sampai tahun 1965. Kondisi ketidakstabilan politik tersebut ternyata tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di Indonesia. Angka pertumbuhan penduduk tetap tinggi, sebagai akibat kebijakan pemerintahan Soekarno yang pronatalis. Kebijakan pronatalis ini juga menyebabkan banyaknya perkawinan dan kelahiran pada masa itu. Angka kelahiran kasar diperkirakan 47,31 pada tahun 1950, sedangkan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 77,2 juta pada tahun 1950. Dari jumlah tersebut sekitar 50,5 juta berada di pulau Jawa.

Angka kematian pada tahun 1950-an tidak banyak mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya serangan cacar

pada tahun 1950. Nitrisastro (1970) mencatat bahwa hasil registrasi penduduk yang dilakukan di daerah Wonosobo menunjukkan angka kelahiran kasar sebesar 21,3 pada tahun 1958.

e. Periode 1960-1990

Pada periode ini data diperoleh dari Sensus Penduduk Indonesia tahun 1961, 1971, 1980, dan 1990. Belajar dari pengalaman selama kegagalan pemerintahan orde lama dalam bidang ekonomi, pada era pemerintahan orde baru kebijakan peningkatan perekonomian menjadi titik perhatian utama. Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi SDM yang baik, hanya akan menambah beban bagi perekonomian negara.

Oleh karena itu, kebijakan pronatalis mulai ditinggalkan dan pada awal tahun 1970 kebijakan KB yang mengatur jumlah maupun jarak kelahiran mulai diberlakukan di pulau Jawa dan Bali. Setelah program tersebut berjalan dengan baik, dilakukan perluasan program KB ke seluruh daerah di luar Jawa-Bali.

Kegiatan KB ini selain ditujukan untuk pembatasan kelahiran, juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberi kesempatan pada perempuan untuk mengembangkan diri. Walaupun penurunan kelahiran juga disebabkan oleh perluasan pendidikan perempuan, peningkatan usia kawin, dan perluasan kesempatan kerja, diakui bahwa peran KB dalam penurunan kelahiran terlihat nyata.

Keberhasilan KB dalam bentuk penurunan angka kelahiran berdampak pula pada angka pertumbuhan penduduk. Hal ini juga ditunjang dengan penurunan angka kematian, terutama dengan kematian bayi. Besarnya angka kematian bayi biasa digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Angka kematian bayi (IMR) telah menurun dengan pesat selama masa pemerintahan orde baru. Jika kita menengok ke belakang setelah proklamasi kemerdekaan, pada tahun 1961 dilakukan sensus penduduk yang pertama. Hasil sensus penduduk 1961 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 97 juta. Dari hasil sensus penduduk tersebut diketahui bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia mengelompok di pulau Jawa dan Madura, yang luasnya hanya 6,9% dari luas daratan Indonesia. Pada tahun 1980 penduduk yang bertempat tinggal di pulau Jawa meningkat menjadi 61,91%. Pada tahun 1990 angka tersebut menurun menjadi 59,99% (BPS 1992).

Dalam kurun waktu 10 tahun, penduduk pulau Jawa mengalami penurunan persentase jumlah penduduk, sedangkan di pulau-pulau lain terjadi peningkatan. Penurunan persentase di pulau Jawa dan peningkatan penduduk di pulau-pulau lain disebabkan arus migrasi dari pulau Jawa ke pulau-pulau lain, serta penurunan angka kelahiran yang lebih cepat di pulau Jawa.

Keberhasilan Keluarga Berencana dalam bentuk penurunan angka kelahiran berdampak pula pada angka pertumbuhan penduduk. Besarnya angka kematian bayi biasa digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Migrasi yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan perubahan arah dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur. Perubahan arus migrasi terjadi karena kebijakan pemerintah untuk mengalihkan migrasi penduduk yang menuju pulau Sumatra ke pulau-pulau lain di Indonesia bagian timur. Selain itu, pertumbuhan pusat ekonomi di Indonesia timur juga menarik minat penduduk pulau Jawa untuk datang ke bagian timur negara ini.

Mantra (1990) mengatakan bahwa selain penduduk Indonesia mengelompok pada pulau yang relatif sempit, lebih dari 50% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan dengan mata pencarian pokok di bidang pertanian. Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk dan makin berkurangnya lahan pertanian karena digunakan untuk keperluan nonpertanian (misalnya untuk perkantoran, terminal bus, dan tempat rekreasi) telah mengurangi secara drastis rata-rata pemilikan lahan pertanian oleh petani.

Karena pemilikan luas tanah yang makin menyempit, langkanya pekerjaan di desa menyebabkan arus migrasi dari pedesaan ke perkotaan meningkat. Arus migrasi tersebut ikut menyumbang pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dewasa ini. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan merupakan sasaran utama pelaku mobilitas menuju kota. Pada periode tahun 1971-1980, kelima kota besar di atas menyumbang 30,5% dari pertumbuhan perkotaan Indonesia yaitu 3.781.535 orang dari 12.380.392 orang (Alatas, 1988). Data ini memberi gambaran terkonsentrasinya penduduk di kota-kota besar.

Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia sangat menghambat proses pembangunan, karena itu sangat penting melaksanakan program redistribusi penduduk bagi seluruh wilayah Indonesia. Dari sudut manapun kita memandang, program redistribusi penduduk ini mempunyai nilai yang sangat penting. Dari segi ekonomi, program redistribusi penduduk berarti menyediakan tenaga kerja serta keterampilan baik untuk perluasan produksi di daerah-daerah maupun pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, akan timbul integrasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah.

Ditinjau dari aspek ideologi, redistribusi penduduk berfungsi untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari aspek politik, hal ini merupakan alat pembauran etnik, mempersempit kesenjangan kelas dan wilayah, serta dapat meningkatkan hubungan antarkelompok. Dilihat dari segi

pertahanan keamanan, redistribusi penduduk juga dinilai dapat mewujudkan terciptanya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Terhadap sumber daya alam, redistribusi penduduk dianggap dapat meningkatkan pengamanan dan sekaligus pemanfaatannya.

Dengan dimulainya Pelita Satu pada tahun 1969, terjadilah perubahan tujuan dari transmigrasi. Program ini sekarang dikaitkan dengan usaha pembangunan daerah. Jadi, penyelenggaraan transmigrasi merupakan hakikat pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

BAB II

KONSEP DEMOGRAFI

6. Fertilitas

Fertilitas adalah kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita. Fekunditas atau kesuburan adalah kemampuan fisik seorang wanita untuk melahirkan anak. Wanita yang tidak dapat melahirkan anak dikatakan mandul (*infecund/infertile*). Fertilitas dalam perkembangannya diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata (bayi lahir hidup) dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Istilah lainnya adalah natalitas dan kelahiran (*birth*).

a. Pengukuran Fertilitas Tahunan

Fertilitas diukur dari kelahiran hidup. Ukuran-ukuran fertilitas tahunan meliputi:

- 1) Tingkat kelahiran kasar (*crude birth rate*);
- 2) Tingkat fertilitas umum (*general birth rate*);
- 3) Tingkat fertilitas menurut umur (*age specific fertility rate*);
- 4) Tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran (*birth order specific fertility rate*).

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kelahiran Kasar

Tingkat fertilitas kasar adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Formulasinya adalah:

$$CBR = \frac{B}{P_m} \times k$$

Di mana:

- CBR = *Crude Birth Rate* atau tingkat kelahiran kasar
B = jumlah kelahiran pada tahun tertentu
P_m = penduduk pertengahan tahun
k = bilangan konstan 1.000

2) Tingkat Fertilitas Umum

Tingkat fertilitas umum adalah perbandingan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk perempuan usia subur (15-49 tahun). Formulanya adalah:

$$GFR = \frac{B}{Pf_{(15-49)}} \times k$$

Di mana:

GFR = *General Fertility Rate* atau tingkat fertilitas kasar

B = jumlah kelahiran pada tahun tertentu

Pf₍₁₅₋₄₉₎ = jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun

k = bilangan konstan 1.000

3) Tingkat Fertilitas Umur

Tingkat fertilitas umur adalah tingkat fertilitas perempuan pada tiap-tiap kelompok umur. Formulanya adalah:

$$ASFR_i = \frac{B_i}{Pf_i} \times k$$

Di mana:

ASFR_i = *Age Specific Fertility Rate* atau tingkat fertilitas kelompok umur

B_i = jumlah kelahiran pada tahun tertentu

Pf_i = jumlah perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun

k = bilangan konstan 1.000

4) Tingkat Fertilitas Urutan Kelahiran

Tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran adalah tingkat fertilitas perempuan menurut urutan kelahiran. Formulanya adalah:

$$BOSFR = \frac{Bo_i}{Pf_{15-49}} \times k$$

Di mana:

BOSFR = *Birth Order Specific Fertility Rate* atau tingkat fertilitas urutan kelahiran

Bo_i = jumlah kelahiran urutan ke-i

- Pf_{15-49} = jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun
 k = bilangan konstan 1.000

b. Pengukuran Fertilitas Kumulatif

Fertilitas kumulatif mengukur rata-rata jumlah anak laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada saat memasuki usia subur hingga melampaui batas reproduksinya (usia 15-49 tahun).

Ukuran fertilitas kumulatif meliputi:

- 1) Tingkat fertilitas total (*Total Fertility Rates/TFR*);
- 2) Tingkat reproduksi kasar (*Gross Reproduction Rates/GFR*);
- 3) Tingkat reproduksi bersih (*Net Reproduction Rates/NRR*).

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tingkat Fertilitas Total (TFR)

Tingkat fertilitas total adalah jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan:

- a) Tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya;
- b) Tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu.

Formulanya adalah:

$$TFR = 5 \sum_i ASFR_i$$

Di mana:

TFR = *Total Fertility Rate* atau Tingkat Fertilitas Total

$ASFR_i$ = tingkat fertilitas menurut kelompok umur ke-i dari kelompok berjenjang 5 tahunan

- 2) Tingkat Reproduksi Kasar/GRR

Tingkat reproduksi kasar adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1.000 perempuan sepanjang masa reproduksinya dengan catatan tidak ada seorang perempuanpun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya.

Formulanya adalah:

$$GRR = 5 \sum_i ASFR_{fi}$$

Di mana:

GRR = *Gross Reproduction Rate* atau tingkat kelahiran kasar

ASFR_{fi} = tingkat fertilitas menurut kelompok umur ke-i dari kelompok berjenjang 5 tahunan untuk bayi perempuan

3) Tingkat Reproduksi Bersih/NRR

Tingkat reproduksi bersih adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh sebuah generasi hipotesis dari 1.000 perempuan dengan memperhitungkan kemungkinan meninggalnya perempuan-perempuan tersebut sebelum mencapai akhir masa reproduksinya.

Formulanya adalah:

$$NRR = \sum_i ASFR_{fi} \times \frac{{}_nL_x}{L_0}$$

Di mana:

NRR = *Net Reproduction Rate* atau tingkat kelahiran kasar

ASFR_{fi} = tingkat fertilitas menurut kelompok umur ke-i dari kelompok berjenjang 5 tahunan untuk bayi perempuan

${}_nL_x$ = jumlah perempuan yang bertahan hidup sampai tepat umur x

L_0 = jumlah bayi perempuan yang lahir pada tahun anggapan ke-0

7. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/ batas bagian dalam suatu negara. Terdapat dua dimensi dalam migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi tempat. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan referensi waktu 6 (enam) bulan untuk menentukan seseorang telah menetap di suatu tempat untuk dianggap sebagai penduduk setempat.

Dalam dimensi tempat, migrasi dibedakan menjadi migrasi antarnegara dan migrasi internal. Migrasi antarnegara adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain atau disebut sebagai migrasi internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam suatu negara atau disebut juga sebagai migrasi nasional, misalnya perpindahan antarprovinsi, kota, atau kesatuan administratif lainnya.

a. Faktor-Faktor Penyebab Migrasi

Faktor penyebab migrasi dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penarik. Faktor-faktor pendorong di antaranya adalah:

- Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan, misalnya menurunnya daya dukung lingkungan, atau menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan-bahan dari pertanian;
- Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal;
- Adanya tekanan politik, agama, dan suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal;
- Pendidikan, pekerjaan, atau perkawinan;
- Bencana alam, misalnya banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang, atau wabah penyakit.

Faktor-faktor penarik di antaranya adalah:

- Harapan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupan;
- Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik;
- Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya;
- Aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, atau pusat kebudayaan yang merupakan daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar.

b. Ukuran Migrasi

1) Angka Mobilitas (m)

Angka mobilitas umum menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk dalam suatu periode tertentu dengan jumlah penduduk yang berisiko pindah.

$$m = \frac{M}{p} \times k$$

Di mana:

- m = angka mobilitas
- M = jumlah perpindahan
- p = penduduk yang berisiko
- k = konstanta (1.000)

2) Angka Migrasi Masuk (m_i)

Angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 orang penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

$$m_i = \frac{I}{p} \times k$$

Di mana:

- m_i = angka migrasi masuk
- I = jumlah migran masuk
- p = penduduk pertengahan tahun
- k = konstanta (1.000)

3) Angka Migrasi Keluar (m_o)

Angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1.000 orang penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

$$m_o = \frac{O}{p} \times k$$

Di mana:

- m_o = angka migrasi keluar
- O = jumlah migran keluar
- p = penduduk pertengahan tahun
- k = konstanta (1.000)

4) Angka Migrasi Netto (m_n)

Angka yang menunjukkan selisih banyaknya migran masuk dan keluar, ke dan dari suatu daerah per 1.000 orang penduduk dalam waktu satu tahun.

$$m_n = \frac{I - O}{p} \times k$$

Di mana:

- m_n = angka migrasi netto
- I = jumlah migran masuk
- O = jumlah migran keluar
- p = penduduk pertengahan tahun
- k = konstanta (1.000)

5) Angka Migrasi Bruto (m_g)

Angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk tempat asal dan jumlah penduduk tempat tujuan.

$$m_g = \frac{I + O}{P_1 + P_2} \times k$$

Di mana:

- m_g = angka migrasi bruto
- I = jumlah migran masuk
- O = jumlah migran keluar
- P_1 = penduduk pertengahan tahun di tempat asal
- P_2 = penduduk pertengahan tahun di tempat tujuan
- k = konstanta (1.000)

c. Urbanisasi

Urbanisasi adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh penambahan penduduk wilayah perkotaan, perpindahan penduduk ke perkotaan, dan atau akibat dari perluasan daerah perkotaan. Terdapat dua indeks yang dipakai mengukur derajat urbanisasi, yaitu:

- 1) Persentase penduduk perkotaan (P_u) yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$P_u = \frac{U}{P} \times 1.000$$

Di mana:

- P_u = persentase penduduk perkotaan
- U = penduduk daerah perkotaan

P = penduduk total

- 2) Rasio penduduk perkotaan-pedesaan, yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$UR = \frac{U}{K} \times k$$

Di mana:

U = penduduk perkotaan

K = penduduk pedesaan

k = konstanta (100)

8. Komposisi dan Persebaran Penduduk

Studi demografi menekankan tiga fenomena yang merupakan bagian penting dari perubahan penduduk, yaitu: Dinamika Kependudukan, Komposisi Penduduk dan Jumlah, serta Distribusi Penduduk.

a. Komposisi Penduduk

Pengetahuan mengenai komposisi penduduk sangat berguna untuk berbagai maksud dan tujuan, seperti:

- 1) Mengetahui SDM yang ada menurut umur, jenis kelamin, maupun karakteristik lainnya;
- 2) Mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan;
- 3) Menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas yang diperlukan;
- 4) Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya;
- 5) Mengetahui "proses demografi" yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk.

Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu secara umum dapat diklasifikasikan menurut:

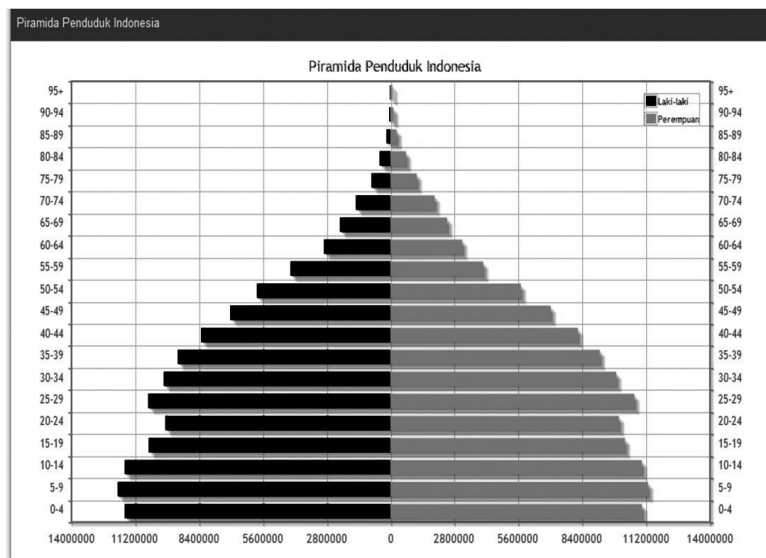
- 1) Karakteristik demografi, yaitu umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak;
- 2) Karakteristik sosial, di antaranya tingkat pendidikan dan status perkawinan;

- 3) Karakteristik ekonomi, di antaranya kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan;
- 4) Karakteristik geografis atau persebaran, di antaranya berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-pedesaan, provinsi, dan kabupaten.

Berdasarkan komposisi penduduk tersebut, maka berbagai indikator yang umum digunakan dalam penyajian data penduduk di antaranya adalah:

- Umur median;
- Rasio ketergantungan;
- Rasio jenis kelamin;
- Angka partisipasi sekolah (kasar dan murni);
- Angka melek huruf.

Selain dengan metode numerik, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan secara visual pada sebuah grafik yang disebut **Piramida Penduduk**.



Piramida Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (BPS)

Penggambaran suatu piramida penduduk dimulai dengan menggambarkan dua garis yang saling tegak lurus. Garis yang vertikal menggambarkan umur penduduk mulai dari nol lalu naik, dengan skala tahunan atau lima tahunan. Garis horizontal menggambarkan jumlah penduduk tertentu baik secara absolut maupun relatif (dalam persen). Bentuk-bentuk piramida penduduk ditentukan oleh tiga proses demografi, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin penduduk dari suatu negara, piramida penduduk dapat dibedakan atas tiga ciri:

- 1) *Ekspansive*: lebar pada bagian dasar piramida, menunjukkan proporsi penduduk muda yang besar dan kecilnya proporsi penduduk tua, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Contohnya adalah Indonesia dan Meksiko pada tahun 1970-an.
- 2) *Constrictive*: bagian dasar piramida kecil dan sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda. Contohnya Amerika Serikat pada tahun 1970.
- 3) *Stationary*: bagian dasar piramida kecil, penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya dan mengecil pada usia tua. Contohnya Swedia pada tahun 1970.

b. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di muka bumi umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Persebaran penduduk secara geografis

Persebaran penduduk di dunia menurut geografis pada umumnya tidak merata. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor alam (kesuburan tanah dan iklim), sosial dan ekonomi (ketersediaan sarana dan prasarana), serta faktor budaya dan politik.

- 2) Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan

Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota; (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Pasal 355 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Perkotaan dapat berbentuk: a) Kota sebagai Daerah; dan b) Kawasan Perkotaan.

Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.



9. Perkawinan dan Perceraian

a. Perkawinan

Terdapat dua bentuk perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan *de facto*, bentuk hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat stabil, jangka panjang, yang mirip dengan sebuah perkawinan tetapi tanpa suatu ikatan hukum yang pasti (*consensual union*);
- 2) Perkawinan *de jure*, penyatuan legal antara dua orang yang berlainan jenis kelamin sehingga menimbulkan hak dan kewajiban akibat perkawinan.

BPS mengelompokkan status perkawinan sebagai berikut:

- 1) Belum kawin, yaitu penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang belum pernah menikah, termasuk penduduk yang hidup selibat atau tidak pernah kawin;
- 2) Kawin adalah mereka yang kawin secara hukum (adat, negara, dan agama) dan mereka yang dianggap hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri;
- 3) Cerai adalah mereka yang bercerai dari suami/istri dan belum melakukan perkawinan ulang;
- 4) Janda atau duda adalah mereka yang suami atau istrinya meninggal dan belum melakukan perkawinan ulang.

b. Perceraian

Perceraian adalah bubarnya perkawinan secara sah yang dikukuhkan oleh surat keputusan pengadilan, yang memberikan hak kepada masing-masing untuk kawin ulang menurut hukum sipil dan agama, sesuai dengan peraturan

atau adat kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap negara. Dalam masyarakat di mana perceraian tidak diperbolehkan, terdapat istilah penangguhan/pembatalan perkawinan, di mana dalam pencatatan biasanya perkawinan ini dikategorikan sebagai bercerai.

Selain perceraian ada peristiwa rujuk, yaitu perkawinan ulang antara suami dan istri yang telah bercerai. Dalam agama Islam, rujuk diperbolehkan dengan memberi batasan dua kali rujuk untuk suatu pasangan. Apabila pasangan tersebut bercerai kembali maka masing-masing pasangan diharamkan untuk menikah kembali kecuali masing-masing telah menikah dengan orang lain dan telah cerai kembali. Dalam agama Katolik, tidak ada peristiwa rujuk karena perceraian tidak diperbolehkan oleh agama tersebut. Sedangkan perkawinan ulang adalah perkawinan yang terjadi antara seorang janda/duda atau yang berstatus cerai dengan laki-laki atau perempuan lain.

10. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya untuk merencanakan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak dalam rangka mencapai tujuan reproduksi keluarga. Determinan KB ditentukan berdasarkan kerangka pikir analisis yang diajukan, misalnya:

- a. Untuk faktor-faktor tujuan kontrasepsi, dapat digunakan jumlah anak dan tujuan fertilitas;
- b. Untuk faktor-faktor kompetensi kontrasepsi, dapat didekati dengan umur istri, lama menikah, pendidikan suami, pendidikan istri, dan status bekerja istri;
- c. Untuk faktor-faktor evaluasi kontrasepsi, dapat digunakan faktor budaya dan sifat dari program KB;
- d. Untuk faktor-faktor akses kontrasepsi, dapat didekati dengan ketersediaan program KB, alat/cara KB yang diinginkan, serta kegiatan-kegiatan program di wilayah tempat tinggal pasangan usia subur.

Hasil beberapa studi menunjukkan bahwa umur, jumlah anak masih hidup, pendidikan perempuan, tempat tinggal, akses yang teratur kepada sumber informasi (surat kabar, radio, dan televisi), kunjungan petugas lapangan KB, status bekerja perempuan, dan lapangan kerja perempuan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap status pemakaian alat/cara KB yang dipilih/digunakan.

11. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Konsep ini berbeda dengan konsep tenaga kerja dalam dunia industri yaitu personel yang bekerja dalam industri atau bisnis.

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labor force*) dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bekerja
- 2) Mencari pekerjaan (menganggur), yang dapat dibedakan antara:
 - a) mencari pekerjaan tetapi sudah pernah bekerja sebelumnya; dan
 - b) mencari pekerjaan untuk pertama kalinya (belum pernah bekerja sebelumnya).

b. Labor Utilization

Berbeda dengan konsep *labor force* (angkatan kerja), pendekatan *labor utilization* (pemanfaatan tenaga kerja) digunakan agar lebih sesuai dengan keadaan negara berkembang. Dalam konsep *labor utilization*, angkatan kerja dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan cukup (*fully utilized*);
- 2) Pemanfaatan kurang (*under utilized*), karena jumlah jam kerja yang rendah, pendapatan/upah atau gaji yang rendah dan tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya;
- 3) Pengangguran terbuka (*open unemployment*).

c. Pengangguran

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang pada saat pencacahan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian ini sering disebut sebagai pengangguran terbuka yang terdiri dari:

- 1) Mereka yang mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan;
- 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja.

d. Setengah Menganggur

Setengah menganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah menganggur terdiri dari:

- 1) Setengah pengangguran terpaksa, yakni mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan;
- 2) Setengah menganggur sukarela, yakni mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain (disebut juga pekerja paruh waktu).

e. Pengangguran Tidak Kentara

Pengangguran tidak kentara adalah angkatan kerja yang produktivitasnya tidak maksimal. Contohnya adalah empat orang bekerja untuk membuat satu kursi padahal sebenarnya bobot pekerjaannya cukup dikerjakan oleh dua orang saja dengan waktu yang sama. Pengangguran tidak kentara ini disebabkan dalam pasar kerja terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja dan sempitnya lapangan kerja.

f. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran tenggang waktu (*waiting time*) sebelum mendapatkan pekerjaan. Contohnya adalah seseorang yang sudah berhenti bekerja karena ingin pindah pekerjaan tetapi tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang baru.

g. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dalam sensus penduduk Indonesia dikemukakan bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan hanya:

- 1) Bersekolah;
- 2) Mengurus rumah tangga;
- 3) Pensiunan, dan/atau mendapat penghasilan bukan dari bekerja (misalnya warisan, deposito, dan lain-lain);
- 4) Berada di rumah sakit dalam waktu lama, di lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya.

12. Sumber Data Kependudukan

Pada umumnya terdapat tiga sistem pengumpulan data penduduk. **Pertama**, sensus penduduk, untuk mengetahui struktur penduduk yang dikumpulkan melalui cacah jiwa serta umumnya dilaksanakan pada waktu tertentu (misalnya 10 tahun sekali pada tahun yang berakhir dengan angka 0). **Kedua**, registrasi penduduk, untuk mengumpulkan data penduduk yang dinamis dan dilaksanakan setiap saat. **Ketiga**, survei penduduk, untuk mengetahui data khusus mengenai karakteristik penduduk

(misalnya mobilitas tenaga kerja yang menuju ke luar negeri) diperoleh dengan melaksanakan survei penduduk oleh instansi tertentu.

13. Urbanisasi dan Kemakmuran di Masa Depan

Laurence C. Smith (2011) menyatakan ada empat kekuatan yang akan membentuk peradaban dunia di tahun 2050, di mana demografi disebut sebagai urutan pertama dalam kekuatan tersebut. Kekuatan lainnya adalah sumber daya alam, globalisasi, dan perubahan iklim. Demografi dalam hal ini adalah kenaikan, penurunan, dan pergerakannya dalam kelompok populasi manusia yang berbeda-beda.

Diperkirakan di masa yang akan datang, penduduk yang tinggal di kota akan lebih besar dibandingkan penduduk yang tinggal di pedesaan. Penyebabnya adalah pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota-kota, serta menurunnya permintaan tenaga kerja di sektor pertanian akibat perkembangan mekanisasi pertanian, komersialisasi pertanian, dan orientasi ekspor. Pekerjaan di sektor pertanian secara global terus menurun, dan untuk pertama kalinya di tahun 2006 pekerjaan di sektor jasa lebih banyak dibandingkan di sektor pertanian.

Menurut *World Population Database* tahun 2008, lebih dari separuh penduduk dunia yang berjumlah 7 miliar jiwa tinggal di kota-kota pada tahun 2007. Angka ini akan mendekati tiga perempatnya pada tahun 2050 seiring dengan pertumbuhan penduduk dari 7 miliar menjadi 9 miliar. Diperkirakan akan terbangun setara satu kota baru berpenduduk 1,4 juta jiwa setiap minggunya. Pertumbuhan penduduk kota terbesar akan terjadi di Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Afrika Sub-Sahara, terutama Nigeria. Laporan dari *The United Nations Population Division* pada tahun 2008, memperkirakan proyeksi kota-kota megapolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, digambarkan dalam tabel di bawah.

Urbanisasi dapat membawa berbagai manfaat, yaitu:

- Percepatan inovasi;
- Kerja sama;
- Pemerataan pembangunan ekonomi dan kemakmuran yang dihasilkannya.

Namun, jika urbanisasi dikelola dengan buruk maka akan mengakibatkan:

- Penurunan mutu hidup;
- Bertambahnya kerusakan lingkungan hidup;
- Peningkatan emisi gas rumah kaca;
- Tekanan sosial; dan
- Pergolakan politik.

Pergeseran dari kehidupan pedesaan ke kehidupan kota ini akan meningkatkan permintaan sumber daya, termasuk air, pangan, dan energi. Oleh karena itu, penting

untuk menjaga keberadaan lahan pertanian produktif untuk menyediakan pangan bagi penduduk dunia yang jumlahnya semakin bertambah.

**Kota Megapolitan
(Populasi dalam Juta Jiwa)**

Tahun	Kota	Populasi
1950	New York-Newark, USA	12,3
	Tokyo, Japan	11,3
1975	Tokyo, Japan	26,6
	New York-Newark, USA	15,9
	Mexico City, Mexico	10,7
2007	Tokyo, Japan	35,7
	New York-Newark, USA	19,0
	Mexico City, Mexico	19,0
	Mumbai, India	29,0
	Sao Paolo, Brazil	18,8
	Delhi, India	15,9
	Shanghai, China	15,0
	Calcutta, India	14,8
	Dhaka, Bangladesh	13,5
	Buenos Aires, Argentina	12,8
	Los Angeles, USA	12,5
	Karachi, Pakistan	12,1
	Cairo, Egypt	11,9
	Rio de Janeiro, Brazil	11,7
	Osaka, Japan	11,3
	Beijing, China	11,1
Manila, Philipines	11,1	
Moscow, Russia	10,5	
Istanbul, Turkey	10,1	
2025	Tokyo, Japan	36,4
	Mumbai, India	26,4
	Delhi, India	22,5
	Dhaka, Bangladesh	22,0
	Sao Paolo, Brazil	21,4
	Mexico City, Mexico	21,0
	New York-Newark, USA	20,6
	Calcutta, India	20,6
	Shanghai, China	19,4
	Karachi, Pakistan	19,1
	Kinshasa, Congo	16,8
2025	Lagos, Nigeria	15,8
	Cairo, Egypt	15,6
	Manila, Philipines	14,8
	Beijing, China	14,5
	Buenos Aires, Argentina	13,8
	Los Angeles, USA	13,7
	Rio de Janeiro, Brazil	13,4
	Jakarta, Indonesia	12,4
	Istanbul, Turkey	12,1
	Guangzhou, China	11,8
	Osaka, Japan	11,4
Moscow, Rusia	10,5	

Sumber: Lawrence C. Smith (2011)

Laporan Bank Dunia tahun 2009, dengan judul *Reshaping Economy Geography*, menyatakan bahwa kepadatan penduduk berkorelasi tinggi dengan konsentrasi tenaga kerja dan modal, yang biasanya terdapat di daerah perkotaan. Korelasi yang kuat antara kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi konsisten dengan sifat daerah

perkotaan yang biasanya menjadi konglomerasi konsumen dan produsen, pembeli dan penjual, serta perusahaan-perusahaan dan pekerja.

Pada tahap awal pembangunan, ketika kegiatan ekonomi terutama di sektor agraria, penduduk hidup tersebar di daerah pertanian. Perkotaan cenderung merupakan kota pelabuhan kecil dan pasar untuk melayani kebutuhan pedesaan dan surplus perdagangan pertanian. Industrialisasi mendorong proses urbanisasi yang cepat, menyebabkan kota baru lahir, dan kota-kota yang ada semakin berkembang. Perpindahan penduduk ke dalam kota lebih cepat dibandingkan perluasan wilayah geografis kota, menyebabkan peningkatan kepadatan populasi dan aktivitas ekonomi.

Terdapat dua transisi pembangunan ekonomi yang berhubungan erat dengan fase urbanisasi. *Pertama*, transisi dari ekonomi agraria ekonomi menjadi lebih berorientasi manufaktur. *Kedua*, transisi dari ekonomi manufaktur menjadi ekonomi berorientasi jasa. Fase pertama urbanisasi, yang terjadi dengan kecepatan tinggi, bertepatan dengan transisi dari ekonomi agraria (pedesaan) ke ekonomi perkotaan (manufaktur). Fase kedua urbanisasi, pada kecepatan yang lebih lambat, terjadi dengan terbukanya peluang pekerjaan di sektor jasa. Di sebagian besar negara, transformasi pembangunan ekonomi dan urbanisasi yang menyertainya, terjadi pada waktu yang sama tetapi di wilayah yang berbeda.

Kepadatan penduduk juga membantu menjamin infrastruktur dasar dan fasilitas kesehatan masyarakat di daerah perkotaan dengan lebih baik. Disparitas yang lebar di awal proses pembangunan mulai mengecil seiring dengan melambatnya proses urbanisasi. Perpindahan orang dan pekerja dari daerah pedesaan ke kota-kota mengurangi kerja surplus dari daerah pertanian dan mengurangi persaingan antarpekerja di pedesaan. Sedikitnya tenaga kerja akan mendorong penerapan teknologi dan meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Pada saatnya nanti, terjadi keseimbangan yang akan menyetarakan kesejahteraan antara penduduk perkotaan dan pedesaan.

Pada saat ini, negara-negara berkembang masih pada tahap pertama urbanisasi, dan oleh karenanya masih mengalami kesenjangan produktivitas dan pendapatan yang besar antara desa dengan kota. Namun, pengalaman di negara-negara industri maju saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar kesenjangan antara desa dengan kota dapat diminimalkan terutama saat tahap kedua proses urbanisasi.

BAB III

SUBSTANSI MATERI DEMOGRAFI

14. Kebijakan Pembangunan Kependudukan

a. Latar Belakang

Kebijakan merupakan suatu keputusan strategis yang berisi rumusan umum untuk mengarahkan semua langkah yang perlu dilaksanakan (sasaran) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan sebaiknya dapat mengakomodir semua persoalan yang ditemukan dan selanjutnya dijabarkan dalam strategi.

H.T. Eldrige dalam Agus Dwiyanto (1995) mendefinisikan kebijakan kependudukan sebagai keputusan legislatif, program administrasi dan berbagai usaha pemerintah lainnya guna merubah kecenderungan penduduk yang ada demi kepentingan kehidupan dan kesejahteraan nasional, namun tidak semua ahli setuju akan definisi di atas.

Sedangkan kebijakan kependudukan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan memengaruhi variabel-variabel demografi yang utama. Dengan demikian, perlu dibedakan antara kebijakan yang memengaruhi variabel-variabel kependudukan maupun yang menanggapi perubahan-perubahan penduduk.

Kebijakan yang memengaruhi variabel kependudukan antara lain adalah program pengadaan vaksinasi anak-anak, yang menyelamatkan mereka dari berbagai penyakit anak-anak yang berbahaya. Vaksinasi demikian akan menurunkan kematian anak-anak dan akan memengaruhi angka kematian penduduk secara keseluruhan.

Kebijakan yang menanggapi perubahan penduduk antara lain adalah program pendirian sekolah-sekolah untuk menampung peningkatan jumlah anak-anak yang disebabkan oleh penurunan angka kematian anak-anak. Suatu kebijakan yang memengaruhi variabel kependudukan dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Kebijakan langsung dalam hal ini antara lain ialah program pelayanan kontrasepsi yang langsung memengaruhi besarnya penduduk akibat

penurunan banyaknya kelahiran. Kebijakan kependudukan bersifat tidak langsung misalnya melalui ketentuan peraturan pencabutan subsidi pada keluarga yang mempunyai anak lebih dari jumlah tertentu, misalnya dua, yang akan memengaruhi jumlah anak yang diinginkan oleh keluarga-keluarga.

Kebijakan kependudukan berhubungan dengan keputusan pemerintah yang memengaruhi variabel penduduk seperti kelahiran, kematian, perpindahan, persebaran penduduk, jumlah, dan komposisi penduduk. Lebih lanjut, menurut D. Lukas yang dikutip Syarif Ali dalam buku Pengantar Ilmu Kependudukan menyebutkan kebijakan kependudukan dapat dibatasi sebagai semua tindakan pemerintah yang dilakukan secara sengaja untuk memengaruhi perkembangan, jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk.

b. Arah, Tujuan, dan Sasaran Kebijakan Pembangunan Kependudukan

Di dalam buku *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035 yang disusun oleh Tim Lintas Kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekarang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) disebutkan bahwa arah, tujuan, dan sasaran kebijakan kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan

- a) Pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama;
- b) Pembangunan kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat;
- c) Pembangunan kependudukan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan;
- d) Pembangunan kependudukan mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan;
- e) Pembangunan kependudukan mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

Arah kebijakan ini selanjutnya dimaksudkan untuk tercapainya tujuan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

2) Tujuan Kebijakan Pembangunan Kependudukan

Tujuan utama pembangunan kependudukan tahun 2011-2035:

- a) Tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa;

- b) Mewujudkan penduduk berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera;
- c) Peningkatan kualitas penduduk, pengembangan sistem informasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi;
- d) Pengelolaan kuantitas penduduk dan pengarahannya mobilitas penduduk serta pembangunan keluarga.

3) Sasaran Kebijakan Pembangunan Kependudukan

- a) Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan;
- b) Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk;
- c) Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal;
- d) Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi untuk:
 - (1) Mewujudkan tercapainya tahap *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk;
 - (2) Mewujudkan keseimbangan SDM dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi;
 - (3) Mewujudkan keluarga yang berketahanan keluarga, sejahtera, sehat, maju, mandiri, harmonis, dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
 - (4) Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

15. Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran, mengapa pembangunan berwawasan kependudukan sangat diperlukan. Berbagai pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya berwawasan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat memang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur, serta meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan/tunawisma sebagaimana yang terlihat selama ini di Indonesia. Demikian pula, dalam pertumbuhan ada yang dinamakan dengan *limit to growth* dan dalam ilmu ekonomi *the law of diminishing return*. Konsep ini mengacu pada kenyataan bahwa suatu pertumbuhan ada batasnya.
- b. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jadi, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk baik kualitas fisik maupun nonfisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.
- c. Keadaan penduduk yang ada sangat memengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional.

Atas dasar 3 (tiga) alasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan mengandung makna sebagai berikut:

- a. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.
- b. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan SDM. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas SDM dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur.
- c. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan, aspek penduduk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan, sehingga manfaat

paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan penduduk yang ada di daerah menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Itu berarti, pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.

- d. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan, ada suatu jaminan akan keberlangsungan proses pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih penting adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasannya.
- e. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah juga kebijakan pembangunan yang senantiasa merujuk kepada dinamika dan tren kependudukan.

16. Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut, pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu, strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan *population mainstreaming*.

Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip *people centered development* untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pelaksanaannya harus mendasarkan pada pendekatan hak asasi. Untuk itu, langkah pertama adalah melakukan *capacity building* untuk seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Langkah berikutnya adalah melakukan integrasi kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan sejak tahap perumusan, implementasi, sampai dengan evaluasi dan *monitoring*.

Dengan memperhatikan bahwa kondisi dari semua aspek di Indonesia tidak homogen, maka disparitas yang terjadi antarprovinsi, terlebih lagi antarkabupaten/kota, harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi. Strategi yang dirumuskan tidak harus bersifat tunggal, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di setiap daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi diperlukan mekanisme yang saling melengkapi antara *bottom-up* dan *top-down*.

a. Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

1) Pengaturan Fertilitas

Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB dengan mengatur: (1) usia ideal perkawinan; (2) usia ideal melahirkan; (3) jarak ideal melahirkan; dan (4) jumlah ideal anak yang dilahirkan.

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) pengaturan kehamilan yang diinginkan; (2) penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu; (3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan; (4) peningkatan kesertaan KB pria; serta (5) promosi pemanfaatan Air Susu Ibu (ASI).

Pengaturan fertilitas melalui program KB juga dilakukan dengan cara berikut: (1) peningkatan akses dan kualitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta pelayanan kontrasepsi di daerah; (2) larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM; (3) pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan; serta (4) perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

2) Penurunan Mortalitas

Penurunan angka kematian (mortalitas) bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya: (1) penurunan angka kematian ibu hamil; (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan; (3) penurunan angka kematian pasca melahirkan; serta (4) penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada: (1) kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri); (2) keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan; (3) pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; serta (4) partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

3) Strategi Pengendalian Kuantitas

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian *windows of opportunity*, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Untuk itu, diperlukan revitalisasi program KB di Indonesia. Dalam melakukan revitalisasi program KB, pendekatan pelaksanaan program KB perlu diubah orientasinya dari *supply* ke *demand side approach*. Strategi yang dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi, kemitraan dan pemberdayaan, serta fokus pada penduduk miskin. Berikut adalah penjelasan detailnya.

Integrasi adalah implementasi program KB ke dalam program pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Sementara itu, desentralisasi dilakukan melalui lima cara. *Pertama*, memberikan otoritas yang lebih besar kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi program KB, salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan. Tujuannya adalah melakukan sinkronisasi dan menghindari *overlap* fungsi dan peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Seperti telah diamanatkan dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga: *Pertama*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) perlu segera dibentuk. Pemerintah memfasilitasi pembentukan BKKBD dengan merevisi regulasi, khususnya yang terkait dengan otonomi daerah yang menghambat terbentuknya lembaga tersebut.

Kedua, melakukan pemberdayaan SDM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka *capacity building*. *Ketiga*, memperkuat komitmen politik, khususnya di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KB. *Keempat*, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program KB di tingkat kabupaten/kota. *Kelima*, mendelegasikan kewenangan operasional di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan otoritas yang lebih besar pada kabupaten/kota dalam rangka mengembangkan program dan melaksanakannya berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah.

Sementara itu, strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan strategi ini adalah untuk lebih mengembangkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program KB. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan *mutual benefits*.

Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antarpemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, nasional maupun internasional. Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

b. Kebijakan Peningkatan Kualitas

1) Dimensi Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup.

2) Dimensi Pendidikan

- a) Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk Indonesia melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional;
- b) Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.

3) Dimensi Ekonomi

- a) Meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran;
- b) Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

4) Strategi Peningkatan Kualitas

Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk. Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan.

Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya SDM yang memadai dalam arti

kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas SDM yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Pembangunan kualitas penduduk Indonesia ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kondisi inilah yang harus dicapai oleh seluruh penduduk Indonesia. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit kronis dan degeneratif. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan *treatment* penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degeneratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus juga diarahkan untuk pencegahan dan *treatment/therapy* penyakit tersebut. Akan tetapi, dengan memperhatikan diversitas kondisi kesehatan antardaerah terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi tidak dapat bersifat homogen atau tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap daerah. Sementara itu, strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan Angka Kematian Ibu/maternal (AKI). Hal tersebut harus ditopang dengan pengembangan pelayanan prenatal maupun antenatal.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Karena di berbagai provinsi angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhannya.

Strategi di 3 (tiga) dimensi tersebut sekaligus merupakan strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, karena keteringgalan Indonesia dalam hal IPM dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya pada bidang pendidikan, maka sektor tersebut perlu menjadi prioritas dalam strategi peningkatan IPM.

c. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Keluarga

1) Kebijakan Pembangunan Keluarga

Pokok-pokok kebijakan pembangunan keluarga memuat pokok-pokok kegiatan membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah; membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; serta membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Sasaran dari pokok kegiatan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga Indonesia yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

2) Strategi Pembangunan Keluarga

- a) Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, strateginya adalah pembangunan keluarga melalui pendidikan etika, moral, dan sosial budaya secara formal maupun informal.

Indikasi keberhasilan dalam membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah:

- Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing;
- Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama;
- Keluarga yang memelihara kerukunan antarumat beragama.

b) Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah.

Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah:

- Meningkatkan pelayanan Lembaga Penasihat Perkawinan;
- Meningkatkan peran kelembagaan keluarga;
- Komitmen pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan yang sah adalah antara laki-laki dan perempuan;
- Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara;
- Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat.

Indikasi keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah:

- Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara;
- Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan dengan sejenis kelamin;
- Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat;
- Setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang dengan dibuktikan oleh kepemilikan akta nikah.

c) Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri.

Strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, dan mandiri adalah:

- Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan. Lokal strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan);
- Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik;
- Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga. Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan.

Indikasi keberhasilan dalam membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah:

- Keluarga berketahanan (kuat, bertahan hidup, beradaptasi);
- Keluarga sejahtera (pendapatan perkapita/bulan tidak miskin, rumah layak huni, mempunyai tabungan);
- Keluarga sehat (kecukupan pangan dan gizi, morbiditas rendah, tidak berpenyakit, sehat psikologis);
- Keluarga maju (partisipasi pendidikan, partisipasi kerja);
- Keluarga mandiri (kemandirian sosial ekonomi);
- Keluarga harmonis (tidak bercerai, penurunan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, penurunan tingkat perdagangan manusia, penurunan tingkat kenakalan anak).

d) Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Strategi yang digunakan adalah penyadaran melalui pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan KIE keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial,

pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Indikasi keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan sosial, berwawasan ke depan (menguasai Iptek), serta berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara (berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan).

- e) Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Strategi yang dilakukan adalah dengan:

- Pendampingan manajemen sumber daya keluarga;
- Konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

Indikasi keberhasilannya adalah:

- Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga;
- Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka *drop-out* menurun;
- Keluarga mempunyai perencanaan keuangan. Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

d. Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Kebijakan pembangunan kependudukan pada penataan persebaran dan pengarahannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong dan mendukung pembangunan-pembangunan daerah yang berkeadilan;
- 2) Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- 3) Pengarahan persebaran penduduk untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
- 4) Pencegahan munculnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya IDPs (*Internally Displaced Persons*);
- 5) Pemberian perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

Strategi untuk mencapai tujuan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk adalah sebagai berikut:

- Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis;
- Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi);
- Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran internasional dan keluarganya;
- Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu;
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- Memperluas kesempatan kerja produktif;
- Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional;
- Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran;
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM;
- Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Beberapa upaya pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk.
- 2) Mengurangi mobilitas penduduk ke kota megapolitan, seperti Jakarta agar tidak terulang di luar Jawa. Dengan adanya penataan wilayah penyangga untuk mengembangkan daerah tujuan transmigrasi yang secara khusus diintegrasikan dengan kota besar sekitarnya. Transmigrasi seharusnya tidak terkesan membuang penduduk ke wilayah terpencil, tetapi benar-benar menonjolkan napas distribusi penduduk.
- 3) Mengurangi peran pusat dan meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secara spontan ke daerah tujuan dengan sasaran menghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak berkualitas berpindah ke daerah lain (mobilitas bukan sekadar

pemindahan kemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung jawab daerah asal/kelahiran.

- 4) Membuat kebijakan yang berskala nasional dan berujung pada kepentingan nasional, misalnya transmigrasi ke pulau terdepan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana ekonomi, serta peningkatan akulturasi dan asimilasi kultural antara pendatang dan penduduk asli.
- 5) Penyusunan *roadmap* kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk tidak semata-mata atas dasar pertimbangan hukum, tetapi juga didasari oleh fakta sosiologis dan dinamika lingkungan sosiokultural dan politik Indonesia pasca reformasi. Berdasarkan pertimbangan ini, maka *roadmap* pengarahannya mobilitas penduduk secara tegas berbasis pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, serta Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Pada saat itu, basis kondisi sosiologis serta dinamika sosiokultural dan politik mengamanatkan penyusunan strategi pengarahannya mobilitas penduduk perlu mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan global, nasional, dan daerah. Basis inipun secara nyata mencermati sejauh mana komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap aspek mobilitas penduduk sehingga menjadi bagian yang integral dan menentukan bagi perkembangan dan keberhasilan pembangunan penduduk dan pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

Pada titik ini, pengarahannya mobilitas penduduk perlu menjamin kepastian pelibatan elemen nonpusat. Fakta yang berkembang menunjukkan bahwa pengarahannya mobilitas penduduk saat ini tidak semata dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga elemen masyarakat sipil dan pasar. Oleh karena itu, penting untuk mereposisi dan mengidentifikasi peran yang harus dimainkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Mereka memiliki kewenangan dan perannya masing-masing. Demikian juga peran dan kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun *Civil Society Organization* (CSO).

Semua elemen harus memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan. Kebijakan mobilitas daerah harus memperhatikan perkembangan-perkembangan spesifik daerah, misalnya

kemungkinan dampak masuknya penduduk ke daerah industri baru, cara mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan dampak negatif bagi daerah tujuan, dampak bagi keseimbangan penduduk lokal dan pendatang, serta kemungkinan marginalisasi penduduk lokal. Dengan demikian, penting dirumuskan sebuah kebijakan lokal yang dapat merespons hal-hal tersebut, misalnya melalui Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Penduduk.

Berbicara tentang pengeralahan penduduk, maka dalam jangka pendek maupun menengah dan panjang, perlu dirumuskan beberapa sasaran pengeralahan mobilitas penduduk yang antara lain meliputi hal-hal berikut:

- 1) Pemodelan rekayasa sosial yang memungkinkan integrasi antara penduduk pendatang dan penduduk asli;
- 2) Pengembangan kebijakan lokal yang pro masyarakat asli tanpa mengurangi hak hidup pendatang;
- 3) Pengembangan regulasi yang memungkinkan adanya *migration selection* berdasarkan kapasitas pendidikan dan keterampilan, aspek politik, dan kelembagaan;
- 4) Penguatan peran elemen masyarakat sipil (CSO, NGO, dan universitas) dalam *capacity building* permukiman baru hasil kebijakan mobilitas formal;
- 5) Pengembangan forum komunikasi antarwarga di daerah-daerah tujuan mobilitas;
- 6) Penguatan kelembagaan keluarga migran dalam konteks kebijakan kesehatan reproduksi;
- 7) Strategi pengembangan daerah penyangga perkotaan dan pengembangan ekonomi pedesaan sehingga mengurangi minat penduduk desa melakukan urbanisasi;
- 8) Pemodelan pengembangan ekonomi makro dan distribusi kesejahteraan yang merata sehingga semakin mengurangi distorsi biaya hidup antarwilayah;
- 9) Memikirkan kembali keterkaitan antara pendidikan dan kesempatan kerja;
- 10) Desentralisasi kewenangan pengeralahan mobilitas penduduk;
- 11) Pengembangan kajian akademis terkait pemodelan mobilitas penduduk dikaitkan dengan kepentingan nasional (sesuai dengan dokumen perundangan), tujuannya adalah untuk pengembangan dan mengonstruksikan proposisi/teori menengah terkait dengan proses-proses migrasi yang berhasil diidentifikasi dari studi terkait

kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini untuk menjawab tantangan tujuan-tujuan pengarahannya dengan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk terkait perkembangan ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan fisik migran, baik lokal, regional maupun global.

- 12) Membangun kerangka konseptual baru yang memungkinkan untuk menjawab tantangan pengarahannya mobilitas penduduk, serta pengembangan strategi-strategi baru terkait dengan pengarahannya mobilitas penduduk, baik internal maupun internasional.

Untuk tercapainya tujuan-tujuan pengarahannya mobilitas penduduk tersebut, maka sejak awal dipastikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP), Perda, dan berbagai aturan pelaksana lainnya telah dapat diselesaikan. Beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan dan penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antar negara;
- 2) Kebijakan mobilitas penduduk *nonpermanent*;
- 3) Penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah;
- 4) Pengarahannya mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga;
- 5) Pedoman pengelolaan urbanisasi di perkotaan;
- 6) Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.

Sementara itu, pada tataran Perda, dibutuhkan adanya Perda tentang kebijakan mobilitas penduduk.

Pada tataran operasional, pengarahannya mobilitas penduduk dalam konteks dukungan terhadap percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dilakukan melalui manajemen terpadu pada koridor utama pembangunan wilayah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu Koridor Ekonomi Sumatra, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku;
- 2) Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*);

- 3) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Keinginan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menebar kekuatan ekonomi ke seluruh penjuru Nusantara ini, semakin kentara melalui percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis koridor (ruang) ekonomi dengan 8 (delapan) program utamanya. Komitmen ini diawali dengan percepatan penyediaan infrastruktur: (1) industri; (2) pertambangan; (3) pertanian; (4) kelautan; (5) pariwisata; (6) telekomunikasi; (7) energi; dan (8) ekonomi kawasan.

Koridor ekonomi yang dalam hal ini berbasis “ruang pulau” terbagi menjadi 6 (enam) koridor sebagai berikut:

- a) Pulau Sumatra sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional;
- b) Pulau Jawa sebagai pendorong industri manufaktur dan jasa nasional;
- c) Pulau Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung energi nasional;
- d) Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional;
- e) Pulau Bali, NTB, dan NTT sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional;
- f) Pulau Papua-Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional (di Papua).

Koridor ekonomi ini, dengan demikian merupakan ruang yang secara sengaja dirancang untuk tempat tumbuh dan berkembangnya komoditas dan/atau usaha unggulan tertentu yang terintegrasi dengan kawasan permukiman dan membentuk pusat-pusat pelayanan baru atau mendukung pusat-pusat pelayanan yang ada. Pola pikir penataan persebaran adalah dengan cara mengembangkan dan membangun sentra-sentra ekonomi di luar Pulau Jawa.

Strategi yang dilaksanakan adalah dengan menciptakan kota-kota metropolitan potensial dari empat kota metropolitan besar menjadi 14 kota metropolitan besar, kota metropolitan kecil dari 3 menjadi 18, kota besar dari 17 menjadi 44, serta penciptaan kota sedang, kota kecil, dan pusat-pusat pertumbuhan (pusat kegiatan lokal). Strategi penataan persebaran penduduk disesuaikan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia dan diarahkan pada pulau-pulau luar Jawa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan potensial. Diharapkan wilayah-wilayah tersebut

menjadi kota-kota metropolitan baru dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menarik penduduk untuk bertempat tinggal di dalamnya.

17. Permasalahan dan Tantangan

Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut di atas, ditemukan permasalahan dan tantangan sebagai berikut:

a. Kesenjangan Wilayah

Secara umum, disparitas antarwilayah merupakan permasalahan pokok di bidang kependudukan. Semua indikator kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk dan juga pembangunan *database* memperlihatkan bahwa masih ada kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Artinya di masa mendatang Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan. Penjelasan di bawah ini merupakan ilustrasi singkat mengenai permasalahan dan tantangan pembangunan kependudukan di Indonesia di tingkat nasional. Penjelasan perlu dipahami dalam konteks seperti telah disebutkan di atas, yaitu permasalahan tersebut tidak bersifat tunggal, tetapi bervariasi antarwilayah. Pendalaman lebih lanjut sangat diperlukan untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk dan juga pembangunan *database*.

b. Permasalahan Kuantitas Penduduk

1) Pencapaian Bonus Demografi

Bonus demografi akan terjadi di tanah air mulai tahun 2025. Bonus “ledakan” kaum muda dan angkatan kerja produktif ini sangat krusial jika SDM yang tumbuh tidak berkualitas. Bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja. Penduduk yang berada di usia angkatan kerja tersebut dapat menjadi potensi bagi Indonesia menjadi negara maju, tetapi juga dapat menjadi bumerang apabila kualitas SDM usia produktif itu rendah. Modal untuk pembangunan adalah kualitas SDM.

Salah satu tanda bonus demografi adalah angka ketergantungan di bawah 50%, artinya satu orang penduduk nonproduktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk usia produktif. Berdasarkan kelompok umur, penduduk dapat dibedakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu muda (0-14 tahun), menengah (15-64 tahun), dan tua (65 tahun ke atas). Pada tahun 2010, proporsi penduduk lanjut usia sebesar 5% dengan proporsi di daerah perkotaan sebesar 4,3% dan di pedesaan sebesar 5,8%. Dibandingkan

dengan sensus penduduk tahun sebelumnya, proporsi penduduk lanjut usia mempunyai tren meningkat dengan rata-rata peningkatan 0,6%.

Peningkatan persentase penduduk lansia dapat diinterpretasikan sebagai hasil perbaikan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, dan perbaikan pola hidup. Proporsi penduduk lansia di daerah pedesaan lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Pengelompokan penduduk yang terkait dengan kemampuan memproduksi secara ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi penduduk nonproduktif dan penduduk usia produktif. Penduduk nonproduktif terdiri dari penduduk yang berumur 0-14 tahun dan penduduk yang berumur 65 tahun ke atas.

Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun. Angka beban ketergantungan Indonesia sebesar 51,3%, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 52 penduduk nonproduktif. Hasil sensus tahun sebelumnya menunjukkan tren yang semakin menurun yang berarti beban penduduk usia produktif semakin kecil sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan.

Secara umum, di tingkat provinsi menunjukkan angka rasio ketergantungan yang menurun. Data BPS menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 51,33%. Sekitar 80 juta penduduk usia tidak produktif di Indonesia bergantung pada sekitar 157 juta penduduk pada usia produktif (15-64 tahun). Angka tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan rasio ketergantungan penduduk sebelum penerapan program KB tahun 1970 yang sekitar 80%. Rasio ketergantungan penduduk antarprovinsi di Indonesia ternyata tidak merata karena hampir setengah dari 33 provinsi di Indonesia memiliki rasio ketergantungan penduduk di bawah rata-rata nasional. Rasio ketergantungan provinsi masih timpang dengan adanya rasio tertinggi di NTT sebesar 73,23% dan rasio terendah di DKI Jakarta sebesar 36,95%. Pemerintah dapat memanfaatkan mobilitas penduduk untuk meratakan angka ketergantungan penduduk antarprovinsi di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan tersebut, penduduk usia produktif dari provinsi lain disediakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah dengan rasio ketergantungan penduduk yang tinggi. Beban ketergantungan merupakan indikator yang tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk muda, tetapi juga ditentukan oleh jumlah penduduk tua. Peningkatan derajat kesehatan yang sangat memadai pada titik tertentu akan berdampak pada membesarnya kelompok ini yang secara langsung akan meningkatkan angka beban ketergantungan penduduk usia produktif.

Dengan kata lain, seiring dengan perjalanan waktu, beban ketergantungan tidak ditentukan oleh besarnya angka kelahiran, tetapi dengan meningkatnya derajat kesehatan. Lansia yang panjang umur, sehat, dan tidak tergantung merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk menjemput penduduk “tua”. Penurunan kualitas fisik dan psikis lansia dapat disikapi secara bijak sehingga kelemahan yang ada dapat dimanfaatkan menjadi suatu modal pembangunan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam membicarakan bonus demografi adalah kualitas penduduk usia “dewasa” atau produktif. Menyiapkan generasi muda yang berkualitas dari aspek pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama untuk membekali generasi muda melakukan kompetisi mendapatkan pasar kerja yang lebih berkualitas. Pengangguran terdidik dan peningkatan angkatan kerja perempuan di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain lapangan pekerjaan yang semakin terbatas merupakan tantangan tersendiri bagi bidang ketenagakerjaan. Satu hal yang perlu disikapi adalah besarnya jumlah penduduk usia kerja yang kemudian disebut dengan bonus demografi benar-benar merupakan jendela kesempatan di bidang ekonomi, bukan sebaliknya sebagai petaka yang menyertai ledakan penduduk usia kerja ini.

2) Pengaturan Angka Kelahiran

Pencapaian bonus demografi sangat tergantung kepada usaha pengaturan fertilitas. Memperhatikan kecenderungan perubahan angka fertilitas, baik dari hasil sensus penduduk maupun Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Tantangan terbesar di bidang kuantitas penduduk adalah tetap mempertahankan penurunan angka fertilitas sehingga dicapai angka *replacement level* yaitu TFR sama dengan 2,1 perempuan.

Target yang dicanangkan dalam RPJMN, yaitu TFR sama dengan 2,1 diharapkan tercapai tahun 2015 dan jika kemudian kecenderungan penurunan TFR berlanjut terus, maka pencapaian angka ketergantungan paling rendah akan dicapai tahun 2030. Akan tetapi, memperhatikan TFR yang cenderung stagnan atau bahkan meningkat, tampaknya Indonesia akan mengalami masalah yang cukup serius. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana TFR dapat diturunkan secara konsisten sehingga mencapai 2,1 tahun 2020. Kondisi tersebut berkaitan dengan menurunnya kinerja program KB, khususnya sejak krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Ada indikasi bahwa prevalensi kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) cenderung stagnan dan *unmet demand* meningkat. Jika penurunan fertilitas menjadi salah satu tujuan kebijakan kependudukan di bidang kuantitas penduduk, maka revitalisasi program

KB menjadi tantangan di tahun-tahun mendatang. Dalam konteks ini ada 4 (empat) tantangan utama yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana mengembangkan aspek kelembagaan sebagaimana diamanatkan oleh UU 52/2009; mengembangkan komitmen politik dalam bidang KB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; mengubah orientasi program KB dari *supply* ke *demand driven*; serta bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, khususnya bagi kelompok miskin.

c. Permasalahan Kualitas Penduduk

1) Pendidikan

Salah satu masalah penting pendidikan di Indonesia adalah masih rendahnya partisipasi murni di tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi (PT). Untuk tingkat SD sudah hampir 95% dan SLTP hampir 70%. Dengan program wajib belajar 12 tahun tampaknya masalah tersebut akan segera teratasi. Akan tetapi jika dilihat di tingkat SLTA dan PT, maka terlihat bahwa angkanya masih relatif rendah. Hal ini menggambarkan rendahnya akses penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA dan PT. Akses penduduk dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akses ekonomi dan akses fisik. Keterbatasan akses secara ekonomi terutama terjadi pada penduduk miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan di jenjang SLTA dan PT. Keterbatasan akses dari sisi fisik mengacu kepada keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi geografis.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata tahun sekolah (*mean years of schooling*), Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Kondisi ini merupakan indikasi besarnya jumlah murid yang *drop out* dari pendidikan SD atau SLTP. Sekali lagi, hal ini terkait dengan persoalan akses terutama akses ekonomi. Pendidikan di Indonesia juga berhadapan dengan tantangan untuk meningkatkan kompetensi dan kompetisi penduduk. Berhadapan dengan globalisasi, peningkatan daya kompetensi dan kompetisi menjadi salah satu kunci.

2) Kesehatan

a) Perilaku kesehatan

Salah satu tantangan terbesar di bidang kesehatan adalah berkaitan dengan perilaku kesehatan. Kesadaran penduduk untuk berperilaku sehat masih rendah.

b) Kesehatan lingkungan

Tantangan dalam bidang ini menyangkut kondisi lingkungan fisik dan biologis yang belum memadai.

c) Pelayanan kesehatan

Dalam pelayanan kesehatan, paling tidak ada dua tantangan yang perlu diperhatikan. *Pertama* adalah berkaitan dengan masih rendahnya akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi penduduk miskin. Akses terhadap pelayanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu akses dari sisi fisik yang terkait dengan kondisi geografis yang tidak menguntungkan dan akses penduduk yang rendah karena kemampuan ekonomi yang tidak memadai. Hal ini terkait dengan ketersediaan dan distribusi pelayanan kesehatan. Tantangan *kedua* adalah kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik belum merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga belum semua penduduk dapat menikmati pelayanan yang prima. Sumbernya adalah masih terbatasnya tenaga kesehatan yang profesional serta distribusi tenaga kesehatan yang timpang.

d) Status gizi

Selama periode 1989-2010, persentase penduduk dengan status gizi kurang dan buruk menurun secara signifikan. Akan tetapi, untuk status gizi buruk angkanya cenderung fluktuatif dan penurunan selama periode tersebut relatif rendah. Dengan kata lain, Indonesia masih berhadapan dengan masalah gizi buruk dan hal ini erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan.

e) Perubahan pola penyakit

Di bidang penanggulangan penyakit, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan. Penanganan dan penanggulangan penyakit yang mudah diberantas dan murah biayanya belum sampai tuntas dilakukan. Tapi kemudian muncul berbagai tipe penyakit yang sulit diberantas dan memerlukan biaya sangat mahal. Transisi epidemiologi tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena munculnya penyakit degeneratif masih diikuti tingginya insiden penyakit infeksi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, sebab angka kematian bayi pada umumnya berkaitan dengan penyakit infeksi, sedangkan kematian penduduk usia dewasa pada umumnya disebabkan karena penyakit degeneratif. Persoalan yang menyangkut penentuan skala prioritas menjadi problematik.

3) Ekonomi

a) Kesempatan kerja dan pengangguran

Jumlah penduduk tahun 1971 sekitar 118,3 juta dan meningkat menjadi 237,6 juta tahun 2010. Angka pertumbuhan

penduduk periode 1971-1980 adalah 2,32% pertahun dan menurun menjadi 1,49% pertahun pada periode 2000-2010. Persebaran penduduk antara Jawa dan luar Jawa sangat timpang. Pada tahun 1971, sekitar 64,2% penduduk bertempat tinggal di Jawa dan menurun menjadi 59,1% tahun 2010.

Ketimpangan ini menyebabkan terkurasnya sumber daya alam atau daya dukung lingkungan di Jawa. Sebaliknya, sumber daya alam yang ada di luar Jawa kurang dimanfaatkan secara optimal karena kekurangan SDM. Dilihat dari struktur umur, terutama usia 0-14, dari sekitar 25,4% atau 63,0 juta tahun 2015 akan terjadi penurunan menjadi 18,9% atau 56,6 juta tahun 2035. Penduduk usia kerja (15+) tahun 2015 hanya sekitar 74,6% atau 185,2 juta dan akan meningkat menjadi 81,1% atau 243,0 juta tahun 2035. Dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 69,2% (Sakernas, 2011), maka jumlah angkatan kerja yang tahun 2015 mencapai sekitar 128,1 juta akan bertambah menjadi 168,2 juta pada tahun 2035.

Apabila angka pengangguran terbuka hanya sekitar 6,7% dan angka setengah pengangguran hanya 29,5%, maka jumlah pengangguran terbuka sekitar 8,6 juta meningkat menjadi 11,3 juta tahun 2035. Kemudian pekerja setengah menganggur meningkat dari 37,8 juta tahun 2015 menjadi 49,6 juta tahun 2035. Apabila pemerintah dan swasta nasional berhasil memperluas kesempatan kerja sebanyak 50% hingga 2035, maka jumlah pengangguran terbuka dan pekerja setengah menganggur masih sekitar 30 juta penduduk. Hal ini merupakan pekerjaan yang berat, tetapi harus dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru. Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja baru.

Setiap tahun, penambahan jumlah angkatan kerja diperkirakan 2 juta sehingga untuk mempertahankan jumlah pengangguran terbuka pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya ada tuntutan penambahan kesempatan kerja dalam jumlah yang sama juga. Jika targetnya adalah penurunan jumlah pengangguran terbuka, maka kesempatan kerja yang diciptakan harus lebih besar daripada jumlah angkatan kerja baru. Permasalahan lain yang dihadapi Indonesia adalah bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil tinggi diikuti oleh peningkatan kesenjangan. Salah satu indikatornya adalah

kenaikan gini rasio. Sejak tahun 2007 hingga 2011, angka gini rasio meningkat dari 0,33 menjadi 0,41.

Ketimpangan pendapatan adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Di samping itu, ketimpangan merupakan sumber dari instabilitas sosial dan politik, sehingga tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam waktu yang bersamaan menurunkan ketimpangan.

b) Kemiskinan

Karakteristik rumah tangga atau penduduk miskin, antara lain berada pada keadaan 4L, yaitu *the last, the least, the lowest*, dan *the lost* atau mereka yang tercecer di belakang. Menurut Bappenas (2007), batasan kemiskinan adalah sekelompok orang atau seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat.

Hak-hak dasar, antara lain adalah terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan dan air bersih, merasa aman dari tindak kekerasan, serta mempunyai hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Persoalan kemiskinan tidak lepas dari ketimpangan pendapatan antargolongan di Indonesia yang diukur dari rasio gini. Data menunjukkan bahwa rasio gini setelah tahun 2006 mengalami peningkatan, sebaliknya pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2007 hingga 2009 mengalami penurunan. Data lain menunjukkan bahwa secara nasional penurunan rasio gini hanya terjadi di perkotaan dari 0,362 menjadi 0,352, sedangkan di pedesaan justru meningkat menjadi 0,297 dari 0,288.

c) Ketahanan pangan

Kebutuhan dasar makanan dan minuman mencakup satu dari 52 komoditas saja, yaitu beras. Kebutuhan pangan beras dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Pantas (KHP), yaitu 10 kg beras perkapita perbulan atau 120 kg beras perkapita pertahun. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 242 juta, tahun 2015 sekitar 257,3 juta, dan tahun 2035 diperkirakan minimal menjadi 307,2 juta jiwa. Menggunakan kriteria di atas, maka kebutuhan pangan beras sekitar 2.575 juta kg perbulan atau 30.900 juta kg pertahun. Jumlah ini akan meningkat menjadi 308,2 juta kg pertahun atau 36.984 juta kg pertahun.

Ini baru kebutuhan pangan beras, belum termasuk kacang, kedelai, jagung, gula, garam, ikan, daging, dan lain-lain. Persediaan beras sebagai makanan pokok nasional, menurun terus akibat dari berbagai hal, seperti penyusutan lahan pertanian pangan menjadi peruntukan nonpangan, gagal panen karena hama dan penyakit, serta musim kemarau yang panjang. Solusi paling mudah adalah mengimpor beras yang banyak menguras devisa negara. Jika pengendalian jumlah penduduk gagal, maka jumlah beras itulah yang akan muncul. Kebijakan penciptaan tanah pertanian pangan yang baru di Jawa-Madura sangat sulit dilakukan dan yang terjadi adalah alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi tempat tinggal, industri, dan jasa. Memperlambat cepatnya penyusutan lahan pertanian dalam jangka panjang sampai 2035 agaknya sulit dilakukan, tetapi ini harus dilakukan.

Penciptaan lahan pertanian baru di luar Jawa adalah pilihan utama sambil mempelajari kegagalan pencetakan lahan pertanian sejuta hektar di Kalimantan. Pemberian subsidi input pertanian juga diperlukan, utamanya dalam bentuk pupuk, bibit unggul lokal, pestisida, dan infrastruktur irigasi teknis. Perlu juga dilakukan perluasan kesempatan kerja di luar sektor pertanian dan pemberdayaan upah sekaligus mengerem urbanisasi desa ke kota. Apabila beberapa hal tersebut gagal dilaksanakan, ada kemungkinan Indonesia akan tetap menjadi pengimpor produk pertanian terbesar di dunia. Hal yang sama juga terjadi dalam hal negara pengimpor garam yang cukup besar jumlahnya, padahal Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.

d) Persebaran dan mobilitas penduduk

Salah satu tantangan pembangunan kependudukan yang perlu memperoleh perhatian serius adalah persebaran penduduk. Hal ini perlu memperoleh perhatian karena masalah persebaran penduduk tidak hanya masalah kependudukan, tetapi terkait dengan pembangunan pada umumnya. Dari sisi pembangunan ekonomi, distribusi penduduk erat kaitannya dengan kesenjangan wilayah.

Daerah padat penduduk merupakan daerah yang secara ekonomi maju, sebaliknya daerah yang tidak padat penduduk adalah daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan. Dalam konteks ini, dikotomi Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali dan/atau kota dengan desa merupakan representasi dari

perbandingan antara daerah maju dengan yang belum atau tidak maju.

Tantangan ke depan adalah membuat suatu wilayah di satu pihak tidak menanggung beban terlalu besar karena menjadi tempat akumulasi penduduk dan pada saat yang sama ada wilayah lain yang tidak mampu melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam karena kekurangan SDM. Hal ini menjadi lebih penting ketika dikaitkan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ketika setiap koridor yang telah ditetapkan berkembang dengan dukungan SDM yang memadai.

Dalam konteks mobilitas penduduk di Indonesia dewasa ini, terdapat beragam tantangan yang perlu menjadi perhatian, yakni transmigrasi, urbanisasi, migrasi tenaga kerja TKI/TKW, pengungsi dalam negeri atau *Internally Displaced Oersons* (IDPs), pencari suaka ilegal, *resettlement*, dan lain-lain. Tiga kecenderungan migrasi di Indonesia sejak tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- *Pertama* adalah mobilitas akibat globalisasi. Migran masuk dengan kualifikasi tenaga ahli dari luar negeri dan diiringi dengan migrasi tenaga kerja dengan keterampilan rendah ke luar negeri mengalami peningkatan.
- *Kedua* adalah proses akselerasi, yakni pertumbuhan pesat suatu daerah akibat proses migrasi (dengan beragam alasan), sebagai contoh adalah kota Jakarta, Balikpapan, dan Batam.
- *Ketiga* adalah proses feminisasi, yakni meningkatnya jumlah migran perempuan yang akhirnya menjadi mayoritas di berbagai tingkatan dan kawasan. Feminisasi pada proses mobilitas penduduk terjadi pada mobilitas internasional oleh tenaga migran TKW/TKI migran. Sebagian besar mereka masih bekerja pada sektor informal, seperti sebagai pembantu rumah tangga dan beberapa pekerjaan rendahan.

Beberapa tahun terakhir, mulai muncul pekerja migran yang masuk ke sektor formal sebagai perawat. Bentuk mobilitas lain yang cukup mengemuka dalam satu dasawarsa terakhir di Indonesia adalah pengungsian (*displacement*) akibat bencana

alam, konflik sosial, kerusuhan lokal, serta intervensi investasi ekonomi yang akhirnya mendorong sebagian penduduk terusir dari tanah kelahiran dan tempat tinggalnya lalu terpaksa untuk pindah ke tempat lain.

Dalam konteks di Indonesia, fenomena pengungsian terjadi secara besar-besaran terkait dengan berbagai konflik sosial dan politik. Sementara itu, perpindahan terpaksa akibat konflik laten antarelemen masyarakat pada satu dasawarsa terakhir akibat munculnya sentimen antipendatang di beberapa wilayah Indonesia yang semakin mengemuka.

Pengungsi dalam negeri atau *Internally Displaced Persons* (IDPs) dalam satu dasawarsa terakhir semakin meningkat dengan berbagai alasan. Perlu adanya kebijakan nasional maupun lokal yang kondusif bagi seluruh penduduk sehingga mengurangi bias kepentingan lokal, etnis, dan kelompok. Konflik lokal yang marak dalam beberapa tahun terakhir harus mampu dikelola dengan baik dan dicarikan solusi dalam kerangka kepentingan nasional. Apabila negara gagal melakukan hal ini, maka tidak dapat dihindari terjadinya mobilitas penduduk dari penduduk nonlokal yang meninggalkan daerah nonasal etnis, meninggalkan daerah mayoritas religi akibat adanya diskriminasi kelompok minoritas, dan proses-proses reklamasi (*reclaiming*) kelompok masyarakat atas aset tanah kelompok masyarakat yang lain (pendatang). Hal yang sangat khas Indonesia adalah pada saat ini fenomena IDPs (sukarela maupun terpaksa) belum dianggap sebagai masalah penting. Belum muncul kebijakan maupun aksi nyata untuk menangani penduduk terusir ini, baik pada tingkatan nasional maupun lokal. Pada kenyataannya, masalah ini sebenarnya semakin meningkat dalam satu dasawarsa terakhir seiring dengan menguatnya isu kedaerahan dalam kebijakan politik saat ini. Konflik di berbagai tempat merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks IDPs, kebijakan mobilitas penduduk harus mampu menjadi bagian dari penyelesaian masalah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik yang terjadi di berbagai tempat merupakan eksekusi dari mobilitas penduduk yang tidak dikelola secara baik. Konflik berdarah yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah menyebabkan tidak kurang dari 1,2 juta manusia yang tersebar di 20 provinsi harus mengungsi di negara sendiri. Meskipun telah ada strategi penanganan pengungsi yang mencakup normalisasi, relokasi, dan pemberdayaan,

penanganan pengungsi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

d. Fenomena dan Dampak Migrasi Internal

1) Migrasi Sirkuler (*commuting*)

- Peningkatan secara eksponensial jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan peningkatan kemampuan jarak tempuh > 50 km perhari dari desa ke kota.
- Paling tidak ada seorang anggota dari 25% rumah tangga pedesaan melakukan ulang-alik desa-kota-desa.
- Sulitnya memperoleh pekerjaan/mengembangkan usaha di pedesaan mengakibatkan ulang-alik dan bekerja/berusaha di sektor informal di perkotaan.
- Jumlah wilayah perkotaan yang terbatas, utamanya di Jawa, dengan infrastruktur dan pelayanan yang tidak memadai serta penegakan hukum yang lemah menyebabkan kekumuhan perkotaan dan kemacetan lalu lintas.

2) Migrasi Musiman (*temporary*)

- Terbukanya lapangan kerja berbasis usaha migas dan berbasis pertanian/kehutanan di luar Jawa (wilayah pedesaan) yang tanpa keberpihakan kepada masyarakat setempat telah menarik penduduk luar wilayah tersebut bermigrasi masuk secara musiman.
- Buruknya konektivitas antarwilayah mengakibatkan masuknya penduduk yang berketerampilan tinggi, cukup pengalaman, dan cukup modal sehingga memicu disparitas di pedesaan.
- Secara nasional terjadi disparitas tingkat upah dan pengangguran antarwilayah, padahal aliran informasi antarwilayah cukup memadai sehingga berpotensi terjadinya kecemburuan sosial. Migrasi internal yang lebih spesifik di Indonesia adalah transmigrasi yang telah dikenal sejak zaman kolonisasi sampai otonomi daerah. Cukup banyak lokasi penempatan transmigrasi dari Jawa, Madura, dan Bali yang telah berkembang pesat dan daerah tersebut menjadi kabupaten/kota, seperti di provinsi Lampung, Sumatra Selatan, Riau, dan Sumatra Utara. Demikian pula yang terjadi di semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi, dan

kawasan timur Indonesia. Persoalan utama yang tidak pernah terselesaikan adalah tanah garapan (pekarangan, ladang, dan sawah) untuk jaminan kegiatan ekonomi rumah tangga migran internal termasuk di dalamnya pelayanan kebutuhan dasar.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, kerja sama dalam penerimaan dan pengiriman antardaerah pengirim dan penerima lebih diintensifkan, dalam arti calon transmigran diberi kesempatan untuk datang dan melihat lokasi yang akan ditempati. Termasuk pula daerah penerima harus menyiapkan calon transmigran lokal (translok) dari penduduk setempat atau dari sekitar lokasi penempatan transmigrasi.

Dengan demikian, proses asimilasi antara pendatang dan penduduk lokal dapat segera tercapai dan sekaligus menghilangkan prasangka buruk di antara kedua kelompok tersebut. Model translok dengan menyisipkan ke dalam transmigrasi umum dalam beberapa hal dapat mengurangi aspek negatif atau saling curiga. Tidak hanya itu, tanah yang disiapkan untuk transmigrasi tidak sekadar diklaimkan sebagai tanah ulayat yang tidak dapat diberikan pada transmigran umum. Pembangunan sarana prasarana pelayanan kebutuhan dasar tidak hanya terbatas pada lokasi penempatan transmigrasi, tetapi terkondisi dengan daerah-daerah pinggirannya. Studi banding untuk translok, bahkan sering didampingi oleh pemerintah daerah Jawa-Bali.

e. Fenomena dan Dampak Migrasi Internasional

- Belum semua profesi pekerjaan berstandar kompetensi internasional sehingga kesempatan kerja di pasar kerja internasional tidak termanfaatkannya secara optimal.
- Hanya pekerjaan D3 (*Dirty-Dark-Dangerous*) di pasar kerja internasional yang dapat dimanfaatkan oleh TKI nonprofesional. Hal ini melemahkan perlindungan bagi tenaga kerja. Investasi asing yang mengalir tanpa batas dan diikuti dengan kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lemahnya regulasi migrasi internasional dalam konteks Perjanjian Perdagangan Bebas menimbulkan persaingan tenaga kerja.

18. Roadmap Pembangunan Kependudukan

a. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup kurun waktu 2010 sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. *Roadmap*

dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan *roadmap* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Tabel 5.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

	2015	2020	2025	2030	2035
Jumlah Penduduk (juta)	253,6	267,8	280,9	292,8	303,1
Dependency Ratios/100	47,69	45,80	44,79	45,89	47,93
	2010- 2015	2015- 2020	2020- 2025	2025- 2030	2030- 2035
Laju Pertumbuhan Penduduk/tahun (%)	1,27	1,12	0,98	0,85	0,71
Angka fertilitas Total (per wanita)	2,18	2,10	2,04	1,99	1,97

Sumber: *Grand Design* Pembangunan SDM 2015-2035 Kemenko PMK (2015)

b. Peningkatan Kualitas Penduduk Rata-Rata Lama Bersekolah

Tabel 4 di bawah adalah target rata-rata lama bersekolah untuk jangka waktu lima tahunan. Skenario rendah yang menggunakan model asimtot 11,3 tahun berdasarkan asumsi rata-rata lama bersekolah negara-negara *very high developed* saat ini adalah sebesar 11,3 tahun. Skenario sedang menggunakan model asimtot 12,6 tahun berdasarkan asumsi maksimal rata-rata lama bersekolah adalah sebesar 12,6 tahun dan skenario tinggi menggunakan model tanpa asimtot.

Tabel 4. Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS)

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2010	5,8	5,8	5,8
2015	6,4	6,5	6,5
2020	6,8	7,1	7,2
2025	7,3	7,6	7,9
2030	7,7	8,1	8,8
2035	8,0	8,6	9,8

Sumber: Data Sekunder Diolah (2012)

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA

Skenario rendah dengan asimtot APM SMA adalah 100%. Skenario sedang dengan asimtot APM SMA adalah 100% dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat 1,5% pertahun, dan skenario tinggi tanpa asimtot (lihat Tabel 5).

Tabel 5. Perkiraan Angka Partisipasi Murni SMA 2015-2050

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2015	51,1	53,7	50,7
2020	56,2	60,7	56,6
2025	60,7	66,6	63,1
2030	64,8	71,7	70,4
2035	68,4	76,0	78,5

Sumber: Data Sekunder Diolah (2012)

Angka Harapan Hidup (AHH)

Skenario rendah menggunakan model asimtot 80 tahun berdasarkan asumsi dari AHH negara-negara *very high developed* saat ini adalah sebesar 80 tahun. Skenario sedang menggunakan model asimtot 83,4 tahun berdasarkan asumsi maksimal AHH sebesar 83,4 tahun. Skenario tinggi menggunakan model tanpa asimtot (lihat Tabel 6).

Tabel 6. Perkiraan Angka Harapan Hidup 2011-2050

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2011	69,4	69,4	69,4
2015	69,7	69,8	71,5
2020	70,1	70,3	74,2
2025	70,5	70,8	77,0
2030	70,8	71,3	80,0
2035	71,1	71,7	83,0

Sumber: UN Revisi 2012

GNI Perkapita (*Purchasing Power Parity/PPP\$*)

Skenario rendah menggunakan model asimtot 10.000 berdasarkan asumsi GNI perkapita PPP\$ rata-rata dunia saat ini adalah sebesar 10.000 perkapita PPP\$ (HDR 2011). Skenario sedang menggunakan model asimtot 12.000 tahun berdasarkan asumsi GNI perkapita PPP\$ negara Eropa dan Asia Tengah saat ini adalah sebesar 12.000 perkapita PPP\$ (HDR 2011). Skenario tinggi menggunakan tren/model tanpa asimtot (lihat Tabel 7).

Tabel 7. Perkiraan GNI Perkapita Indonesia 2011-2035

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2011	3.716	3.716	3.716
2015	4.494	4.741	4.241
2020	5.332	5.846	5.002
2025	6.042	6.783	5.900
2030	6.645	7.577	6.959
2035	7.155	8.250	8.209

Sumber: Data Sekunder Diolah (2012)

c. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun kegiatan untuk setiap periode dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. *Roadmap* Pembangunan Keluarga

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2011	3.716	3.716	3.716
2015	4.494	4.741	4.241
2020	5.332	5.846	5.002
2025	6.042	6.783	5.900
2030	6.645	7.577	6.959
2035	7.155	8.250	8.209

Sumber: Data Sekunder Diolah (2012)

d. Pengarahan Mobilitas Penduduk

Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah pokok-pokok *Roadmap Grand Design* Pengarahan Mobilitas Penduduk 2010-2034.



**Tabel 9. Pokok-Pokok *Roadmap Grand Design*
Pengaruh Mobilitas Penduduk 2011-2035**

POKOK-POKOK*	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
1. Pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang mempunyai keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat-pusat pertumbuhan → terkait dengan kota-kota kecil, kota menengah, kota besar, dan kota metropolitan	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
2. Peningkatan kerja sama pembangunan antardaerah (desa-kota, kota-kota, antarprovinsi)	xxx	xxx	xx	Xx	x
3. Peningkatan pelayanan investasi	xxx	xxx	xx	X	x
4. Pengembangan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan dan kebutuhan pasar	xxxxx	xxxx	xxxx	Xxx	xxx
5. Peningkatan kualitas SDM dengan memprioritaskan pada penduduk setempat dan pekerja migran untuk menjadi wirausahawan yang handal dan pekerja yang kompeten	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
6. Pemodelan rekayasa sosial bagi integrasi antara penduduk pendatang dan penduduk asli dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
7. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	xxx	xxx	xx	Xx	xx
8. Peningkatan infrastruktur intra dan antarwilayah	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
9. Pengarahan gerak keruangan penduduk dengan mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
10. Pengarahan dan fasilitasi gerak keruangan penduduk yang terpaksa pindah	xxxx	xxxxxx	xxxxx	Xxxxx	xxxxx
11. Reviu menyeluruh untuk memperkirakan dampak positif dan negatif kebijakan migrasi (lalu lintas penduduk) internasional yang harus terintegrasi dengan paket (R/O) liberalisasi perdagangan dalam kerangka FTA (barang dan jasa)	xxx	xxx	xx	X	x
12. Penyiapan SDM yg kompeten berstandar internasional merupakan kebutuhan mutlak sejak dari dunia pendidikan hingga ke/dan selama di dunia kerja, dan merupakan salah satu alat perlindungan utama dalam hubungan kerja	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxx	xxxx
13. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	xxx	xx	xx	Xx	xx
14. Penguatan peran dan kapasitas elemen masyarakat sipil (CSO, NGO, dan universitas) dalam pengembangan pemodelan pengelolaan kebijakan pengarah penduduk	xxx	xx	xx	Xx	xx

Sumber: Data Sekunder Diolah (2012)

e. Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya, *roadmap* pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Adapun penahapannya dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Roadmap Pembangunan Database Kependudukan

POKOK-POKOK*)	2011- 2015	2016- 2020	2021- 2025	2026- 2030	2031- 2035
Periode konsolidasi ke dalam dan tertib administrasi kependudukan.	XXXXX	XXXX	XXX	XX	XX
Periode pelayanan prima administrasi kependudukan.	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX	XX
Periode pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge-base society</i>)	XXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXX
Periode integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.	XXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXX
Periode peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai DSS (<i>Decision Support System</i>).	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX

Sumber: Data Sekunder Diolah (2012)

BAB IV

PERAN DEMOGRAFI DALAM KETAHANAN NASIONAL

19. Umum

Ketahanan Nasional (Tannas) sebagai konsepsi merupakan pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional secara utuh dan menyeluruh serta terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, dan Wawasan Nusantara (Wasantara).

Dengan kata lain, konsepsi Tannas Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, baik rohaniah maupun jasmaniah. Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam.

Implementasi konsepsi Tannas melibatkan seluruh komponen bangsa mulai dari individu, keluarga, masyarakat, institusi pemerintah maupun nonpemerintah, serta adanya kualitas manusia Indonesia yang dapat berperan baik dalam kancah globalisasi dunia maupun pembangunan dalam negeri. Untuk itu, determinasi Tannas suatu bangsa dapat dianalisis melalui keterhubungan antar*resultante* ketahanan bangsa tersebut, yang dikenal dengan istilah Astagatra meliputi gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Teori Tannas yang diusung oleh Lemhannas RI esensinya adalah bagaimana melihat sesuatu itu secara komprehensif, integral, dan holistik, yang bermuara pada persatuan dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, patut dilakukan analisis keterkaitan antara Bidang Studi Demografi dengan Astagatra, sebagai berikut.

20. Gatra Geografi

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan dilalui gugus lempengan bola dunia, serta merupakan rangkaian gunung berapi yang masih aktif dan labil, sangat rawan terhadap bencana alam antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran, tanah longsor, serta rawan pula terhadap berbagai penyakit. Ada 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar yang memerlukan penanganan khusus dalam pembangunan pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain keterbatasan transportasi serta kualitas SDM yang masih belum optimal ditambah kurangnya penguasaan iptek, sering terjadi keterbatasan penanganan permasalahan pembangunan.

Kepadatan penduduk yang tidak merata, khususnya antara desa dan kota, antara Jawa (sekitar 60% penduduk berada di Pulau Jawa, dengan luas sekitar 6,6% dari luas Indonesia) dengan luar Jawa (sekitar 40% penduduk berada di luar Pulau Jawa, dengan luas sekitar 93,4% dari luas Indonesia), antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, semuanya telah melahirkan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara empiris, ternyata kondisi geografis ini merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan terjadinya mobilitas penduduk antardaerah, karena antara lain masalah transportasi, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan SDM di berbagai daerah, karena SDM yang potensial akan terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang relatif akses lebih mudah untuk dijangkau.

Hal ini akan berpengaruh pada daya tampung dan pembangunan di daerah tersebut, karena daerah yang akses transportasinya mudah dijangkau (Pulau Jawa) akan menjadi minat utama bagi para investor dalam berinvestasi, hal ini akan berdampak positif bagi daerah dan masyarakat setempat. Namun bagi daerah-daerah yang akses transportasinya lebih sulit seperti daerah-daerah di Indonesia bagian timur, mereka akan sulit mendatangkan para investor, sehingga pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan nasional menjadi lambat.

Pada dasarnya yang perlu dipahami oleh pimpinan tingkat nasional tentang demografi/kependudukan terkait Gatra Geografi, bahwa permukaan bumi yang menjadi wilayah yurisdiksi negara Indonesia adalah ruang hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Di atas ruang hidup ini rakyat Indonesia berdaulat untuk mendapatkan dan meningkatkan kesejahteraan serta keamanan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat dari gangguan yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri.

Untuk mendapatkan dan meningkatkan kesejahteraan itu, penduduk Indonesia harus mau dan mampu melakukan pengaturan dari perkembangan jumlah/kuantitas penduduknya sedemikian rupa, sehingga segala kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, maupun papan, paling tidak secara minimal dapat terpenuhi, termasuk bagi rakyat yang hidup di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil.

Di sisi lain, rakyat Indonesia harus pula mau dan mampu melakukan pengaturan untuk meningkatkan kualitas SDMnya, baik dari segi kesehatan maupun pendidikan

dan juga keterampilan di semua bidang kehidupan, termasuk dalam menguasai Iptek, sehingga kebutuhan atas berbagai jenjang pendidikan/keterampilan dari setiap lapangan pekerjaan, sebanyak-banyaknya dapat diisi dari tenaga kerja dalam negeri.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, mengingat begitu luasnya wilayah kedaulatan negara dan masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh pembangunan, maka rakyat Indonesia harus pula mau dan mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi mobilitas penduduk di darat maupun di laut dan di udara sebagai penghubung antar pulau. Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut, maka kegiatan perpindahan barang dan jasa dari luar negeri dan di dalam negeri dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Selain pengaturan kuantitas penduduk dan mobilitas di atas, ada hal yang tidak kalah pentingnya yaitu mengurangi wilayah menjadi terlalu padat atau melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ruang hidup ini harus dikelola sedemikian rupa, tidak hanya perlu tersedia alokasi wilayah untuk pemukiman (desa dan kota, termasuk sarana pendidikan dan kesehatan), daerah produksi (pertanian dan peternakan, perikanan air tawar dan budidaya di laut maupun pertambangan dan industri), dan untuk kegiatan rekreasi/pariwisata, tetapi juga perlu dialokasikan untuk daerah penyangga/perlindungan berupa hutan, cagar alam yang berfungsi mencegah terjadinya longsor pada saat hujan berlebih, gempa bumi, gunung api meletus ataupun terjadinya tsunami. Hal ini mengingat bahwa suatu daerah memiliki fisiografi yang berbeda, ada lereng yang terjal atau lembah yang curam yang dapat dimanfaatkan untuk dibuat bendungan/waduk sebagai sarana persediaan air di musim kemarau atau kekeringan (musim kemarau yang berkepanjangan).

Pengaturan kualitas penduduk juga merupakan hal yang sangat penting, mengingat kesehatan penduduk akan memengaruhi pengeluaran penduduk yang ujungnya pengeluaran negara menjadi besar, padahal dana untuk membiayai pemulihan penyakit tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan lainnya. Selain itu, adalah tentang pendidikan dan atau keterampilan penduduk karena Iptek terus berkembang, sehingga rendahnya kemampuan mengikuti perkembangan Iptek akan menyebabkan lepasnya peluang pekerjaan yang mungkin dapat diraih anak bangsa, yang pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya masalah pengangguran, bahkan mungkin menimbulkan kecemburuan sosial dengan segala dampaknya, hal ini disebabkan karena kesempatan pekerjaan tersebut diisi oleh bangsa lain. Kualitas pekerjaan yang dapat diisi oleh suatu bangsa, mencerminkan kemampuan keluarga dan juga negara dalam membiayai pendidikan.

21. Gatra Demografi

Dari hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2014 diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia saat itu berjumlah 254,9 juta jiwa, ini merupakan penduduk

dengan jumlah terbanyak ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% pertahun.

Penduduk Indonesia terdiri dari lebih dari 1000 (seribu) etnis dan subetnis, disertai keragaman budaya, agama, dan bahasa. Kondisi ini merupakan suatu kekuatan yang sangat besar apabila mampu dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Namun di sisi lain, keragaman ini juga menyebabkan tingkat kesenjangan yang semakin tajam antara kaya dan miskin, antara yang maju dengan yang terbelakang, yang berpendidikan dengan yang putus sekolah, dan sebagainya.

Hal yang paling menonjol dan harus dihindari dari keragaman ini adalah rasa keakuan dan kekamian, di mana aku dan kami lebih mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya. Dalam kehidupan bersama, sikap hidup yang harus dikembangkan adalah rasa kekitaan. Sikap kekitaan akan melahirkan rasa kebersamaan, merasa senasib dan sepenanggungan, saling tolong-menolong, tidak ingin melihat anak bangsa ini tertindas, menderita dan miskin yang berkelanjutan.

Pada dasarnya yang perlu dipahami oleh pimpinan tingkat nasional tentang kependudukan terkait Gatra Demografi, bahwa akurasi data-data demografi adalah sangat penting karena akan diacu dalam proses pengelolaan negara. Data harus akurat mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Hal ini berarti, data yang diperoleh haruslah berupa fakta, bukan hasil manipulasi atau rekayasa.

Kegiatan perencanaan apapun, tanpa adanya keakuratan data, maka hasil akhirnya dapat dipastikan tidak akan efektif dan efisien, termasuk perencanaan pembangunan. Dengan demikian, hasil akhir kegiatan dari pelaksanaan pembangunan dapat diharapkan akan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu untuk mendapatkan atau meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi penduduk, baik warga negara Indonesia yang berdiam di dalam maupun di luar negeri, baik sebagai tenaga kerja maupun yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan.

BPS melakukan berbagai sensus. Terkait demografi, BPS melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun. Data ini kemudian diolah secara statistik ataupun matematik sesuai dengan kebutuhan. Dengan sensus penduduk secara berkala tersebut, akan dapat dilihat berbagai perubahan, baik *output* maupun *outcome*, yang terjadi dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dari kumpulan data statistik penduduk tersebut, akan mudah dilakukan perhitungan laju pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu. BPS melakukan sensus penduduk terakhir pada tahun 2010.

Dari sensus penduduk tersebut diketahui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan di atas 64 tahun). Pada masa bonus demografi (tahun 2020-2030) ini, sering disebut adanya jendela peluang (*windows opportunity*). Peluang ini bisa positif dan bisa

juga negatif. Peluang disebut positif, apabila tenaga kerja yang belum bekerja terserap dalam lapangan kerja, sedang sebaliknya disebut negatif. Dengan terserapnya sebagian besar tenaga kerja usia produktif ini, maka penghasilan keluarga akan meningkat. Kesejahteraan keluarga yang makin meningkat ini akan meningkatkan daya beli dan tabungan masyarakat. Dampak dari meningkatnya daya beli dan tabungan ini akan menggerakkan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan devisa negara.

Hal utama yang penting terkait demografi ini adalah kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan mobilitas penduduk. Data untuk ketiga hal ini, sebaiknya diambil dari BPS, sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi mengurus statistik negara.

22. Gatra Sumber Kekayaan Alam

Indonesia memiliki Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang berlimpah dan beraneka ragam. Jika kita mau jujur bahwa sampai saat ini belum seluruh SKA yang kita miliki diketahui jumlah dan jenisnya, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan SDM yang belum sepenuhnya mampu untuk mengetahui keberadaan SKA tersebut, apalagi memanfaatkannya, bahkan sering kali orang luar lebih mengetahui keberadaan SKA yang kita miliki dibandingkan kita sendiri, karena mereka menguasai iptek.

Perlu menjadi perhatian bersama bahwa SKA yang besar dapat dipakai sebagai modal dasar bangsa Indonesia untuk menyejahterakan rakyatnya, namun demikian SKA yang besar dapat juga menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, karena banyak negara yang ingin menanamkan modal/pengaruhnya untuk ikut menguasai/mengelola SKA yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Keberadaan SKA yang tersebar di berbagai bagian wilayah Indonesia, perlu mendapatkan perhatian agar supaya tetap terjaga keamanan dan pemanfaatannya. Kondisi ini akan semakin rumit apabila sebaran penduduk di berbagai wilayah juga tidak proporsional, sehingga berpotensi terhadap gangguan dan ancaman terhadap SKA yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, apalagi bila di lokasi di mana terdapat SKA yang bernilai tinggi tidak ada penduduknya sama sekali. Dengan demikian, sebaran penduduk di setiap wilayah yang proporsional juga akan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam menjaga dan mengamankan keberadaan dan pemanfaatan SKA di wilayah NKRI.

Pada dasarnya yang perlu dipahami oleh pimpinan tingkat nasional tentang demografi/kependudukan terkait Gatra SKA, bahwa wilayah bumi yang menjadi wilayah yurisdiksi negara Indonesia adalah sumber hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki hampir semua jenis SKA yang akan mampu mendukung kebutuhan hidup dan kehidupan rakyatnya.

Untuk kebutuhan pangan, hampir semua jenis tanaman pangan dapat hidup subur, bahkan jika disesuaikan dengan kebutuhan air dan jenis tanah, tentunya hasil panennya optimal. Curah hujan di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari yang kurang dari 1.000 mm/tahun hingga yang lebih dari 3.000 mm/tahun, tergantung lokasinya yang terkait dengan pergerakan angin musim. Dengan demikian, yang perlu disesuaikan adalah tanaman jenis apa yang cocok dengan jenis tanah dan curah hujan setempat.

Demikian juga untuk kebutuhan energi, hampir semua jenis energi ada di bumi Indonesia, seperti energi matahari; energi angin; energi fosil (Bahan Bakar Minyak/BBM dan batu bara); energi panas bumi; energi air baik yang berasal dari danau, waduk, bendungan maupun aliran arus sungai; energi di laut (energi arus, energi ombak, dan energi dari perbedaan temperatur (*ocean thermal energy conversion*)); energi yang berasal dari tumbuhan (jarak, singkong (gasohol)); dan energi sampah; serta energi nuklir. Permasalahannya adalah ada di komitmen pemerintah, selain faktor nilai ekonomis, juga terkait alokasi untuk subsidi. Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah keberlanjutan penelitian dan pengembangan tentang berbagai energi tersebut, termasuk teknologi konversi dalam penyesuaian ke bidang permesinannya.

Hutan dan hasil hutan, selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, juga berfungsi sebagai penyimpan dan penahan erosi air (*hidroorology*). Hutan dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk pembangunan atau sebagai kayu bakar, sebagai tempat rekreasi alam dan suaka alam serta kualitas lingkungan hidup bagi penduduk, baik sebagai sumber oksigen maupun penyerap pencemaran udara. Terkait penyerap pencemaran udara, yang paling membahayakan adalah hujan asam, sehingga perlu diupayakan untuk meminimalisir penggunaan timbal dalam bahan bakar.

Selain itu, Indonesia juga memiliki hampir semua mineral yang dapat dijadikan sumber daya mineral bagi berbagai kebutuhan di bidang kesehatan dan bangkitnya kegiatan ekonomi penduduk. Permasalahan yang ada adalah sangat terbatasnya data potensi sumber daya dari masing-masing mineral tersebut. Hambatan utama hal ini karena biaya untuk eksplorasi mineral relatif mahal, yang timbul sebagai dampak dari minimnya SDM dan harga peralatan survei yang relatif mahal serta biaya transportasi karena lokasi dan sebaran keberadaan sumber mineral. Tentunya hal ini menjadi kesulitan tersendiri dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, apalagi jangka panjang untuk kepentingan kesejahteraan generasi bangsa selanjutnya.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan teknologi atas semua SKA. Banyak sekali teknologi yang belum dikuasai oleh anak bangsa, sehingga memerlukan bantuan dari investor dari mancanegara. Untuk itu, perlu dipikirkan pendidikan dan keterampilan penduduk atau rakyat Indonesia dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek, agar kesejahteraan dapat timbul dari pemanfaatan SKA, yang pada gilirannya dapat digunakan bagi pembiayaan sektor pertahanan dan keamanan.

23. Gatra Ideologi

Pancasila merupakan pandangan hidup, falsafah, ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mengajarkan kepada anak bangsa ini antara lain: pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa; semangat persatuan dan kesatuan nasional; pengakuan akan Hak Asasi Manusia (HAM); demokrasi; keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dapat dikatakan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila akan melekat dan dapat diwujudkan serta dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan nasional bangsa Indonesia.

Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah mengalami berbagai cobaan dalam mengisi kemerdekaannya, seperti adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948 dan tahun 1965, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, dan lain sebagainya, di mana semuanya itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Situasi dan kondisi yang demikian dapat diatasi, karena bangsa Indonesia memiliki ideologi yang dapat menjaga keutuhan NKRI, yaitu ideologi Pancasila.

Dalam hubungannya dengan krisis multidimensional, yang bermula dari krisis ekonomi dunia, merembet ke Indonesia menyebabkan lahirnya krisis kepercayaan kepada pemerintah, terjadilah krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis keamanan. Semuanya menjadikan Indonesia instabilitas, terjadi gejolak dalam negeri dan mengancam disintegrasi bangsa. Anak bangsa ini patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan adanya ideologi Pancasila, krisis tersebut dapat diatasi dengan segala daya dan upaya pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menghadapi segala bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Kesadaran masyarakat (penduduk) untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan kata kunci dalam mengatasi setiap bentuk ATHG, baik yang datang dari dalam maupun dari luar sehingga keutuhan NKRI tetap terjamin.

Pada dasarnya yang perlu dipahami oleh pimpinan tingkat nasional tentang demografi/kependudukan terkait Gatra Ideologi, bahwa seluruh penduduk atau rakyat suatu bangsa, termasuk mereka yang sedang berada di luar negeri karena berbagai alasan, perlu mempunyai kesamaan idealisme dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, pimpinan bangsa telah bersepakat bahwa Indonesia akan dapat berdiri tegak di atas Lima Dasar yang kemudian dikenal dengan Pancasila, lalu Pancasila ini ditetapkan sebagai Ideologi Negara, yang kemudian dituangkan dalam proses penyusunan Dasar Negara. Dalam

pelaksanaannya, Pancasila menjadi falsafah dan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Sebagai perwujudan dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap rakyat berhak menganut agama sesuai dengan kepercayaannya; sila kedua, menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab (HAM); sila ketiga, mementingkan persatuan anak bangsa; sila keempat, berorientasi kerakyatan (menghargai demokrasi); serta sila kelima, menjunjung tinggi keadilan sosial.

Seperi diketahui dalam perjalanan sejarah, sejak kemerdekaan hingga kini, bahwa upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain cukup sering terjadi, seperti ingin menggantinya dengan paham komunis atau penerapan syariat Islam secara penuh. Pemberontakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis (paham yang tidak mengakui adanya Tuhan), dilakukan oleh PKI sebanyak 2 kali, yaitu dipimpin oleh Moeso tahun 1948 dan dipimpin oleh Untung tahun 1965. Hal ini dapat digagalkan karena tidak sesuai dengan sila pertama.

Sementara itu, pemberontakan untuk penerapan syariat Islam oleh DI/TII dipimpin Daud Beureuh tahun 1953-1962, pemberontakan Amir Fatah tahun 1950-1959 di Jawa Tengah, pemberontakan Kartosuwiryo tahun 1942-1962 di Pulau Jawa dan dipimpin Kahar Muzakar tahun 1950-1965 di Pulau Sulawesi, serta pemberontakan kecil-kecil lainnya. Pemberontakan ini dapat digagalkan juga karena pada kenyataannya bangsa Indonesia terdiri dari beberapa agama dan aliran dalam kepercayaannya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perwujudan idealisme membutuhkan waktu. Selaras dengan berjalannya waktu dan perkembangan lingkungan strategis, termasuk berkembangnya teknologi, berkembang pula kuantitas dan kualitas penduduk Indonesia, akan berdampak pada semakin dinamis kehidupan sosial di masyarakat.

Masyarakat yang majemuk dalam banyak hal dikaitkan dengan pendidikan yang semakin tinggi, namun secara umum masih rata-rata delapan tahun, ditambah dengan kemajuan teknologi dan informasi mengenai HAM, maka gaung tuntutan atas kesamaan hak dan kewajiban sosial dan kederajatan dalam hukum makin menguat, akan berdampak makin sulitnya memperkuat rasa persatuan bangsa dan menjaga kesatuan wilayah NKRI.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sosialisasi tentang idealisme berbangsa dan bernegara harus terus berlanjut, baik melalui pendidikan maupun digaungkan perwujudannya dalam hidup keseharian, utamanya dalam toleransi dari semua aspek kehidupan, sehingga dapat diharapkan adanya kesadaran kolektif penduduk untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pemerintah dapat fokus dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi penduduknya.

24. Gatra Politik

Adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari segenap komponen bangsa yang digerakkan oleh pemerintah bersama rakyat Indonesia telah berhasil memasukkan isu kependudukan dalam kerangka pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagai penjabaran politis dari kerangka pembangunan nasional jangka panjang, telah memasukkan isu kependudukan sebagai salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Demikian pula dengan jargon penduduk yang dikenal selama ini sebagai sentral pembangunan atau penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan. Maksudnya adalah pembangunan dengan memperhatikan dinamika kependudukan yang ada.

Kenyataan menunjukkan bahwa keberhasilan yang dicapai dalam tataran politis tersebut belum diimplementasikan dalam tataran praktis operasional. Pembangunan dilakukan bukan di ruang hampa, tetapi dilakukan di ruang hidup yang penuh dinamika, untuk itu pembangunan akan berhasil bila dilakukan secara tertib dan teratur dan didukung dengan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Dengan adanya stabilitas yang mantap dan dinamis, berarti keadaan politik dalam negeri haruslah tumbuh dan berkembang tanpa adanya gejolak politik yang menimbulkan kegoncangan-kegoncangan di dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menghambat jalan pembangunan nasional.

Stabilitas nasional perlu terus dipupuk, dibina, dan ditingkatkan melalui upaya pembangunan nasional di mana di dalamnya mengandung konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, secara serasi dan seimbang. Harus disadari bahwa kelemahan pada salah satu aspek kehidupan akan berpengaruh pada aspek lainnya yang pada gilirannya akan dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kerangka NKRI.

Pada dasarnya yang perlu dipahami oleh pimpinan tingkat nasional tentang demografi/kependudukan terkait Gatra Politik, bahwa perlu ada sarana bagi penduduk untuk menyampaikan aspirasinya dalam mencapai kesejahteraan dan keamanan kepada pemerintah.

Penyampaian aspirasi penduduk ini disampaikan melalui jalur partai politik yang anggotanya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota partai yang duduk di DPR ini adalah wakil dari sekian banyak pemilih pada saat Pemilihan Umum (Pemilu). Makin banyak rakyat memilih anggota-anggota dari suatu partai politik, makin besar kemungkinan aspirasi yang akan mendapat perhatian.

Untuk mendapatkan pemilih yang banyak, maka partai politik sering kali memanfaatkan selebriti, sehingga nyaris dapat dipastikan aspirasi yang disuarakannya tidak berkualitas sebagai akibat lemahnya kemampuan menyampaikan urgensi substansi dan negosiasi.

Persoalan gatra politik dari sudut kependudukan, terkait dengan kuantitas penduduk adalah keikutsertaan menjadi pemilih karena dipengaruhi kondisi geografi yang terdiri dari banyak pulau, pulau yang bergunung dengan medan dan akses jalan masih alami, pulau yang kecil dan berpenghuni sedikit, mereka harus didatangi.

Adapun persoalan dari sudut kualitas penduduk adalah pendidikan dan kesehatan. Dari sudut pendidikan adalah pemilih umumnya tidak paham politik dan tidak tahu dampak dari pilihan yang dilakukannya dalam kotak suara, termasuk oleh pemilih awal, baik karena baru berusia 17 tahun atau telah menikah walaupun belum berusia 17 tahun. Mereka ini sering kali menjadi sasaran dari suatu iming-iming yang tidak terpuji dari seorang calon. Permasalahan dari kesehatan adalah pemilih yang pada saat pemungutan suara dalam keadaan sakit parah atau uzur, sehingga tidak dapat menyampaikan pilihannya.

Permasalahan dari mobilitas penduduk adalah diperlukan perlakuan khusus karena berbagai alasan mereka tidak berada di domisilinya karena harus berada atau bepergian ke luar kota ataupun ke luar negeri. Biaya menjadi besar, namun suara mereka sebagai rakyat harus diberi kesempatan untuk memilih saat Pemilu.

Permasalahan bagi penduduk selaku pemilih adalah terlalu banyaknya partai sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, sehingga pemilih mudah menjadi bingung. Indonesia pernah mempunyai hanya tiga peserta Pemilu, yaitu dua partai dan satu golongan pada periode orde baru. Perlu diketahui, nyaris tidak ada partai yang melakukan pendidikan politik kepada kadernya, bahkan partai sering kali lebih mengedepankan selebritis untuk dipilih daripada kader handalnya karena besarnya biaya kampanye.

Untuk itu, perlu dipikirkan membatasi jumlah partai dan pemanfaatan selebritis untuk menggalang pemilih, mengingat dari hasil beberapa penelitian, banyaknya partai menjadikan sulitnya menghasilkan undang-undang yang berkualitas serta sangat minimnya kontribusi selebriti akibat tidak mampu bernetamorfosis menjadi politikus yang handal.

25. Gatra Ekonomi

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati bonus demografi, yaitu terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ration*) penduduk nonusia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja

(*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas SDM (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas 50% pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 4,9% antara tahun 2008 dan 2031 (sumber: Bappenas, RPJPN 2015-2019). Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi, baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38% dari total penduduk usia produktif ASEAN.

Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja di Indonesia selain dapat meningkatkan angkatan kerja dalam negeri, juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia.

Langkah-langkah yang perlu diambil, yaitu:

- Mengoptimalkan kerja sama global dengan memperhatikan dimensi sosial budaya;
- Memperluas lapangan kerja;
- Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor;
- Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri;
- Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak;
- Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja;
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja.

Pada dasarnya yang perlu dipahami oleh pimpinan tingkat nasional tentang demografi/kependudukan terkait Gatra Ekonomi, bahwa kuantitas penduduk memengaruhi jumlah serapan hasil produksi dari suatu kerajinan atau industri. Makin besar jumlah penduduk semakin menarik bagi investor untuk menanam modalnya di suatu negara.

Adapun kualitas penduduk dengan kemampuan daya belinya serta mempunyai selera yang lebih beragam akan merangsang kegiatan ekonomi yang lebih dinamis bagi investor, mulai dari pengusaha bahan baku, industri hingga pemasaran. Demikian pula dengan mobilitas penduduk, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri karena dapat dipastikan membutuhkan sarana dan prasarana berupa infrastruktur jalan, rel, jembatan, pelabuhan, terminal, baik darat, laut, dan udara yang semakin berkualitas, termasuk beragam destinasi untuk rekreasi atau pariwisata. Dengan kondisi demikian, maka data potensi penduduk dari segi kuantitas, kualitas, serta mobilitas menjadi penting diketahui oleh pemerintah, pengusaha maupun kerajinan atau industri.

26. Gatra Sosial Budaya

Secara empiris terlihat bahwa kondisi sosial budaya bangsa Indonesia sangat adaptif, respek dan lentur terhadap program pembangunan kependudukan, khususnya program Keluarga Berencana (KB). Kondisi yang demikian telah menjadikan Indonesia

sebagai suatu negara paling sukses di dunia dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk pada satu sisi. Sedangkan pada sisi lain masih adanya tradisi, budaya, dan adat istiadat yang kurang sejalan bahkan bertentangan dengan program KB. *Output* dari kerja keras para petugas KB dalam menyadarkan masyarakat telah berbuah manis pada perubahan cara pandang dan perubahan sikap masyarakat serta adanya sinergitas antara masyarakat dengan petugas KB dalam menyelesaikan program KB.

Program KB akhirnya mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, dan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis sadar bahwa setiap orang yang akan membangun rumah tangga harus memiliki perencanaan yang baik dan matang, mulai dari tujuan pernikahan, memilih pasangan hidup, membina keluarga, merencanakan jumlah anak, dan yang terkait dengan urusan kerumahtanggaan yang akan dibina.

Salah satu kendala pada saat dicanangkannya program KB di Indonesia adalah menghadapi adat istiadat, budaya, serta agama yang menjadikan program KB itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun hal tersebut pada akhirnya dapat diatasi dengan baik, dan bahkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat memberikan dukungan yang besar terhadap suksesnya program KB. Pemanfaatan teknologi informasi melalui tayangan di televisi, sinetron, radio, media cetak, dan media lainnya telah membantu masyarakat dalam menyerap informasi tentang program kependudukan.

Pada dasarnya yang perlu dipahami oleh pimpinan tingkat nasional tentang demografi/kependudukan terkait Gatra Sosial Budaya adalah bahwa kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk dapat memengaruhi kondisi sosial budaya di suatu masyarakat. Dengan demikian, pengaturan kuantitas, peningkatan kualitas, dan fasilitasi mobilitas penduduk harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa, sehingga mengakselerasi timbulnya kesejahteraan.

Masalah sosial yang umumnya terjadi adalah seperti gelandangan (ketidakmampuan memiliki tempat tinggal), anak jalanan (langkanya tempat bermain), anak nakal (kekurangan keteladanan di rumah dan lingkungan), pengemis (kesulitan mendapat modal atau lapangan kerja), dan lain-lain. Dampak dari hal-hal tersebut, munculnya penyakit sosial seperti pencurian, perampokan, perjudian, narkoba, dan pelacuran. Selain itu, mudah terjadi konflik sosial sebagai akibat kesenjangan ekonomi, kesulitan mendapat lapangan kerja, minimnya pendidikan kebangsaan, minimnya kepedulian sosial, termasuk terhadap pelanggaran lalu lintas dan dalam hal taat membayar pajak.

Untuk itu, perlu terus dibangun kekuatan sosial budaya yang ada di masyarakat, seperti nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai universal untuk pengendalian pertumbuhan kuantitas dan kualitas penduduk, seperti kemampuan adaptasi sosial, yaitu akulturasi dan asimilasi, budaya gotong royong, kesenian, dan olah raga.

27. Gatra Pertahanan Keamanan

Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu pulau serta penyebaran penduduk yang tidak merata dan didukung pula oleh kondisi geografi Indonesia yang terbuka, menjadi peluang bagi negara-negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal SDA seperti kayu, produk kayu, dan kertas merupakan bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula kepada kehidupan ekonomi.

Konflik yang berkepanjangan di negara-negara seperti Irak, Syria, Afganistan, dan munculnya *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) serta konflik agama Rohingya Birma, dan berbagai konflik di wilayah ASEAN lainnya telah menyebabkan banyak warga negaranya yang mencari suaka politik ke negara lain seperti Australia melalui Indonesia. Kepergian mereka dari negaranya ke negara tujuan tidak jarang menggunakan alat transportasi air (lahirlah istilah manusia perahu).

Menurut Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman menyatakan jumlah manusia perahu yang masuk ke Indonesia semakin banyak dalam 10 tahun terakhir. Saat ini sebanyak 544 orang manusia perahu yang masih ditampung di tenda Kampung Tanjung Batu Berrau Kalimantan Timur untuk dipulangkan ke Malaysia (Kompas, 24 November 2014).

Adanya migrasi internasional ini harus menjadi perhatian bersama, di samping terkait dengan kependudukan (pengungsi dari negara lain harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum internasional). Lebih jauh dari itu harus diperhatikan dari perspektif pertahanan dan keamanan negara.

Pada dasarnya yang perlu dipahami oleh pimpinan tingkat nasional tentang demografi/kependudukan terkait Gatra Pertahanan dan Keamanan, bahwa kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk dapat memengaruhi kondisi pertahanan dan keamanan di suatu daerah/wilayah. Dengan situasi seperti itu, maka kuantitas penduduk yang ada dapat dipersiapkan untuk menjadi bagian dari personel pertahanan, sesuai dengan doktrin pertahanan semesta. Penduduk perlu dilatih sesuai dengan kemampuan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan itu sendiri.

Terkait dengan mobilitas penduduk dari luar negeri, umumnya yang berasal dari negara yang sedang bergejolak di negaranya maupun perang dengan negara lain perlu diwaspadai, bukan tidak mungkin sebagian dari pengungsi itu adalah sebagai bagian dari anggota intelijen. Sementara itu, terkait mobilitas rakyat Indonesia ke negara-negara sekitar perlu dibekali dengan wawasan kebangsaan dan ikut menjaga keharmonisan dengan penduduk setempat dalam rangka menjaga hubungan antarnegara.

BAB V

KETERKAITAN DEMOGRAFI DENGAN BIDANG STUDI LAINNYA

28. Demografi dengan Wawasan Nusantara

Berbagai ahli berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menyebabkan berbagai persoalan khususnya dalam bidang sosial budaya dan sosial ekonomi dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa. Di Indonesia, kebijakan kependudukan melalui pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi pembangunan berwawasan kependudukan yang memerlukan suatu landasan visional yaitu wawasan nasional. Wawasan Nasional yaitu Wawasan Nusantara (Wasantara) merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, yang tidak menghilangkan, tetapi menghargai dan menghormati kebhinnekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Setiap kehidupan nasional selalu berada dalam suatu sistem yang mengadakan interaksi dengan bagian dari sistem lain dan berinteraksi serta berinterdependensi dengan dinamika lingkungan strategi, sehingga dapat menimbulkan dampak berupa ATHG yang datang dari dalam maupun dari luar.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis tersebut perlu diterapkan Wasantara dalam arti Wasantara menentukan arah pembangunan nasional, termasuk pembangunan kependudukan. Perkembangan kependudukan di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai program yang bersifat lintas bidang dan lintas sektor. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa kebijakan, strategi, dan program kependudukan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam ikatan NKRI. Dari sisi demografi, Wasantara harus disosialisasikan sejak dini sebagai wawasan nasional dan geopolitik bangsa Indonesia mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, sampai secara nasional.

29. Demografi dengan Ketahanan Nasional

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan dan mewujudkan keuletan serta ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional melalui

pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan bagian konsepsi Tannas dan merupakan pencerminan dari perwujudan bidang kependudukan. Di dalam Tannas utamanya gatra demografi dilihat dari kuantitas, kualitas, mobilitas dan basis data, sehingga tercapai Tannas yang diharapkan.

Penduduk Indonesia saat ini jumlahnya adalah sekitar $\pm 254,9$ juta jiwa pada tahun 2014 dan menduduki urutan nomor 4 di dunia, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, di mana penduduk di pulau Jawa sangat padat sedangkan di luar pulau Jawa masih sangat jarang, hal ini telah memengaruhi kemampuan daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan pembangunan nasional dan rentang kendali pemerintahannya dibutuhkan informasi dan teknologi yang dapat meliputnya. Kondisi ini juga merupakan modal yang besar untuk meningkatkan peran media pemberitaan dengan posisi sekarang Indonesia sebagai pengguna internet nomor 4 terbesar di dunia, pengguna *Twitter* dan *Facebook* nomor 6 di dunia akan menjadi kekuatan pengganda yang besar dalam menyosialisasikan pemberitaan masyarakat media.

Pertambahan penduduk yang besar akan menambah beban pembangunan bila tidak dibina dan ditingkatkan kualitasnya. Penduduk merupakan modal dan faktor dominan pembangunan nasional, juga sekaligus merupakan subjek dan objek pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu media pemberitaan tentang kependudukan yang mampu menyajikan informasi tentang jumlah penduduk dan pertumbuhannya, jumlah angkatan kerja, jumlah usia anak sekolah, jumlah pengangguran, dan lain-lain. Melalui media pemberitaan tersebut akan mampu meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil bagi penguatan, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat guna restorasi sosial Indonesia dalam rangka Tannas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang unik, yaitu negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dua benua dan dua samudra. Kondisi geografis ini di satu pihak merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, namun harus dipahami juga, bahwa kalau tidak pandai mengelola anugerah ini, maka menjadi tantangan yang luar biasa. Dari hasil pengukuran Tannas, indeks gatra geografi pada tahun 2016 ini sudah mencapai kategori cukup tangguh dengan nilai indeks 2,68. Walaupun secara gatra sudah mencapai kategori cukup tangguh, namun kalau dilihat pervariabel masih banyak yang termasuk pada kategori kurang tangguh seperti sarana dan prasarana.

30. Demografi dengan Kewaspadaan Nasional

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebutuhan primer penduduk adalah adanya rasa aman. Rasa aman tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh kelompok orang

tertentu, akan tetapi rasa aman tersebut dibutuhkan oleh setiap orang, setiap keluarga, dan oleh lingkungan tempat tinggal, juga oleh organisasi bahkan bagi suatu negara. Untuk terwujudnya keamanan pribadi, bagi yang mempunyai kedudukan mereka akan menyewa petugas keamanan (*security*) untuk menjaga keamanan di manapun mereka berada, sedangkan bagi suatu negara rasa aman tersebut diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan akan aparat dan peralatan pertahanan (alutsista). Semakin profesional dan lengkapnya alutsista suatu negara, maka semakin tinggi rasa aman penduduk dalam negara tersebut.

Pertanyaan generik muncul, dalam menjalankan kehidupan nasionalnya, dapatkah bangsa Indonesia dalam wadah NKRI mempertahankan kesepakatannya mempertahankan persatuan dan kesatuannya, mempertahankan integrasi nasionalnya? Pertanyaan lain sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana bangsa Indonesia harus menjalankan kehidupan nasionalnya menuju cita-cita dan tujuan nasionalnya? Adalah wajar pertanyaan itu muncul, karena menurut Teori Organik, bangsa dan negara adalah kehidupan, setiap makhluk hidup akan mempertanyakan kelangsungan hidupnya. Oleh karenanya, jaminan kelangsungan hidup akan selalu menjadi pertanyaan akan menjadi sesuatu yang sangat vital (*core value*) yang setiap saat perlu dan harus diwaspadai. Kewaspadaan adalah sikap yang berkaitan dengan jaminan kelangsungan hidup (*survival*). Oleh karena itu juga, Kewaspadaan Nasional (Padnas) menjadi sebuah konsekuensi dari sebuah kelahiran bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Mengaitkan dengan pertanyaan kesanggupan mempertahankan kesepakatan menjaga persatuan, mempertahankan kelangsungan hidup dalam integrasi nasional NKRI berikut cara-cara dalam menjalankan kehidupan nasional, akan sangat tergantung dari potensi ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, terlebih dalam era globalisasi. Di samping itu, kualitas Padnas akan sangat berpengaruh terhadap jalannya kehidupan nasional, karena Padnas adalah sikap, kualitas kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi ancaman.

Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang mempunyai adat istiadat berbeda-beda, serta adanya pengaruh lingkungan strategis, semuanya itu menjadi rawan akan perpecahan apabila tidak mampu dikelola dengan baik. Dengan demikian, masalah keamanan menjadi kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan (TNI dan Polri), tetapi kewaspadaan dini perlu disikapi oleh seluruh penduduk Indonesia.

31. Demografi dengan Sistem Manajemen Nasional

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, berjumlah 254,9 juta jiwa. Bila dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, maka penduduk Indonesia merupakan sumber daya yang potensial yang dapat diberdayakan dalam berbagai strata dan profesi, sedangkan SKA memiliki keragaman hayati, nabati, dan

mineral serta luas laut yang mendominasi $\frac{2}{3}$ wilayah Indonesia memiliki kandungan yang tak ternilai bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Ketiga potensi alam tersebut perlu dikelola, diolah, dan diberdayakan menjadi kemampuan nyata untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pengelolaan potensi tersebut diperlukan perpaduan antara faktor karsa, sarana, dan upaya yang merupakan suatu metode untuk mengubah setiap potensi yang ada menjadi kemampuan agar memperoleh keberhasilan (*outcome*) sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam lingkup tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, secara konseptual mengubah Trigatra (potensi alamiah) menjadi Pancagatra (kemampuan). Kemampuan nyata yang perlu dibangun adalah kemampuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan melalui suatu pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan nasional, diperlukan suatu keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber daya dan sumber dana nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Proses itu semua dapat dinamakan Sistem Manajemen Nasional (Sismennas).

Sismennas adalah suatu upaya menyeluruh dengan memadukan faktor karsa, sarana, dan upaya ("*Ends-Means-Ways*") untuk memberdayakan, mengubah, meningkatkan potensi menjadi kemampuan nasional. Mengubah potensi menjadi kemampuan dilaksanakan melalui pembangunan nasional. Indonesia memiliki potensi berupa geografi, demografi, dan SKA tak terperi jumlahnya. Potensi-potensi tersebut merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Luas Indonesia bila dibentang di Eropa akan menutup London sampai Istanbul. Bila di benua Amerika, akan terbentang dari pantai barat ke pantai timur. Kekayaan flora dan fauna memiliki berbagai varietas dan spesies. Hasil-hasil hayati dan nabati dapat digali di negara kepulauan RI. Di tahun 2000, para pimpinan dunia bertemu di New York mengumumkan "Deklarasi Milenium". Sebuah tekad untuk menciptakan "lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan" di tahun 2015. Indonesia ikut menandatangani di antara 189 negara lainnya.

Khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan ekstrem di tahun 2015, menargetkan harus turun setengahnya atau tinggal 50%. Namun realita mengungkapkan, secara absolut jumlah penduduk miskin masih tinggi. Data jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 tercatat sebesar 32,53 juta jiwa (14,15%). Strategi yang digariskan untuk melepaskan dari perangkap kemiskinan, yaitu *pro growth*, *pro jobs*, dan *pro poor*. Pencapaian tersebut memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% pertahun dalam lima tahun mendatang.

32. Demografi dengan Kepemimpinan Nasional

Para ahli demografi pada mulanya memproyeksikan bahwa pada abad ke-21, jumlah penduduk sudah sedemikian besarnya, tahun 2017 sebanyak 8 miliar, idealnya hanya tiga sampai dengan empat miliar (3-4 miliar), sehingga tidak ada lagi ruang untuk bergerak, mereka tidak memperkirakan adanya pembangunan ekonomi modern serta adanya pengaruh kepemimpinan nasional dalam mengelola pembangunan, termasuk pembangunan kependudukan.

Secara umum, disparitas antarwilayah merupakan permasalahan pokok di bidang kependudukan. Pada tahun 2035, populasi Indonesia diperkirakan akan mencapai 343,04 juta jiwa, sehingga manajemen SDM menjadi penting dalam membangun strategi negara, sebagaimana faktor demografi menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk mencapai kesuksesan terhadap beberapa aspek terkait, yaitu jaminan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan dukungan. Hal ini membutuhkan pemimpin nasional yang handal, termasuk kepemimpinannya.

Terdapat bermacam-macam definisi tentang kepemimpinan nasional. Kepemimpinan Nasional diartikan sebagai kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra (Astagatra) pada bidang/sector profesi baik di suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang (Dr. Adi Sujatno, S.H., M.H.).

Sementara itu, DR. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A (Presiden RI periode 2005-2015) menekankan 5 (lima) karakter manusia unggul yang ingin dicapai oleh Indonesia. *Pertama*, manusia-manusia Indonesia yang sungguh bermoral, berakhlak dan berperilaku baik. Oleh karena itulah, masyarakat kita harus menjadi masyarakat yang religious. *Kedua*, mencapai masyarakat yang cerdas dan rasional. *Ketiga*, manusia-manusia Indonesia yang makin ke depan menjadi manusia yang inovatif dan terus mengejar kemajuan. *Keempat*, SBY mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat semangat harus bisa, yang terus mencari solusi dalam setiap kesulitan. *Kelima* (terakhir), kita semua, manusia Indonesia haruslah menjadi patriot sejati yang mencintai bangsa dan negaranya, mencintai tanah airnya (*Pentingnya Karakter Bangsa*, situs resmi Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 20 Mei 2011).

Pemimpin nasional yang dipilih 5 tahun sekali melalui demokrasi Pemilu DPRD, DPD, DPR, Presiden dan wakilnya, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi, Kabupaten dan Kota akan terseleksi secara alami dan lolos sebagai pemimpin nasional. Dari sisi demografi masih terdapat kendala yang sangat mendasar, yakni di

bidang pendidikan, bahwa lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlahnya lebih besar daripada lulusan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, tentu akan menyulitkan dalam melahirkan kader pemimpin nasional sesuai yang diharapkan. Sementara kualitas pemimpin nasional dituntut memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan, taat dan mampu menegakkan hukum, memiliki keteladanan, dan memiliki integritas yang tinggi yang diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari penjelasan di atas, betapa pentingnya peran seorang pemimpin di dalam menggerakkan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, salah satu yang harus dilakukan oleh para pemimpin tingkat nasional untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang unggul adalah dengan membangun manusia-manusia Indonesia yang berkualitas dan berkemampuan tinggi, sehingga dapat bersaing dan memenangkan persaingan pada setiap *event*, bangsa yang unggul secara komparatif dan kompetitif.

33. Demografi dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 membawa konsekuensi pada perubahan *mindset* dan perilaku penduduk (selanjutnya disebut dengan masyarakat). Kebebasan dan keterbukaan dimaknai berlebihan, termasuk cara masyarakat memandang hukum.

Secara teoretis dapat dikemukakan bahwa dalam konsep penegakan hukum, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap penduduk termasuk penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Penyimpangan perilaku masyarakat yang kadang mengabaikan aturan hukum sering kali terjadi, seperti tindakan anarkis. Perbedaan pendapat dan/atau perbedaan kepentingan bisa berakhir pada tindakan anarkis, konflik sosial atau unjuk rasa dapat berujung pada kericuhan, bentrokan, dan tindakan anarkis. Terhadap tindakan-tindakan semacam ini, hukum harus ditegakkan dengan optimal agar negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tercapai. Tegaknya hukum guna mendukung supremasi hukum ini merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya Tannas yang tangguh.

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa objek dan subjek hukum adalah manusia (penduduk), tegak dan berjalannya hukum sebagaimana yang diharapkan,

akan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perbandingan antara aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk yang harus diawasi masih belum seimbang. Contoh, 1 orang polisi mengawasi 100 orang, sekarang ini masih mengawasi 400 orang bahkan ada daerah yang 1.000 orang, demikian juga aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, demografi dan penegakan hukum membutuhkan penegak hukum yang profesional.

34. Demografi dengan Pengaruh Lingkungan Global

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini, sangat dirasakan adanya pengaruh globalisasi yaitu ekonomi global dan informasi. Hal ini ditandai dengan derasnya arus informasi yang tidak mengenal batas. Arus informasi tersebut dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kehidupan di dalam negeri. Untuk itu, sebagai suatu bangsa yang berdaulat, kita dituntut untuk mewaspadainya dan mampu untuk memilih dan memilah penggunaan informasi apa saja yang ada manfaatnya dengan masuknya atau beredarnya berbagai informasi baik yang tertulis maupun visual mengenai sesuatu keadaan/kejadian. Sementara faktor ekonomi adanya perdagangan bebas menuntut Indonesia untuk menyiapkan produknya agar mampu bersaing dengan negara lainnya, guna meningkatkan kesejahteraan dan keamanan.

Pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan informasi kependudukan yang resmi agar tidak terjadi bias dengan kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak benar. Informasi kependudukan yang tertata dengan baik dapat menjadi aset baik untuk kepentingan di dalam negeri maupun sebagai bahan rujukan bagi negara-negara lainnya yang membutuhkan.

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi telah memungkinkan suatu bangsa dari berbagai negara di dunia ini untuk melakukan interaksi. Apabila masyarakat keliru mencernakan informasi tersebut maka akan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Kondisi tersebut dapat menjadi suatu ancaman, termasuk ancaman dalam bidang kependudukan, yang apabila masalah tersebut tidak disikapi dengan bijak oleh pemerintah disertai langkah-langkah yang konkret untuk menghindari pengaruh negatif yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu, peran pemimpin baik formal, nonformal, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi keluarganya, terutama anak-anak dari pengaruh IT, *handphone*, TV, *Facebook*, *Twitter* dengan memberikan pengertian, pendampingan, dan pembatasan akses informasi yang tidak sesuai dengan adat, perilaku, dan kebudayaan Indonesia.

Pengaruh lingkungan global yang juga akan mewarnai pembangunan kependudukan di tahun-tahun mendatang, apalagi Indonesia telah ikut meratifikasi

kesepakatan pembangunan global atau *Millenium Development Goals* (MDGs) yang menekankan pencapaian pembangunan tahun 2015 untuk meningkatkan taraf kehidupan. Dalam MDGs terdapat 8 (delapan) sasaran yang sangat terkait dengan kependudukan, yaitu: (1) pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar yang universal; (3) promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) pengurangan tingkat kematian bayi; (5) peningkatan kesehatan ibu; (6) pencegahan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; (7) penjaminan keberlanjutan lingkungan; dan (8) kemitraan global. MDGs ini merupakan semacam konklusi dari berbagai kesepakatan internasional yang juga harus dianut oleh negara-negara yang ikut meratifikasinya (termasuk Indonesia).

Untuk tahun 2017 berlaku *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari: 17 *goals*, 169 target, 300 indikator. (1) *Goal 1*: 7 target, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; (2) *Goal 2*: 8 target, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan; (3) *Goal 3*: 13 target, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; (4) *Goal 4*: 10 target, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; (5) *Goal 5*: 9 target, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan anak perempuan; (6) *Goal 6*: 8 target, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang; (7) *Goal 7*: 5 target, menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang; (8) *Goal 8*: 12 target, mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang; (9). *Goal 9*: 8 target, membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi; (10) *Goal 10*: 10 target, mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara; (11) *Goal 11*: 10 target, menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan; (12) *Goal 12*: 11 target, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (13) *Goal 13*: 5 target, mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; (14) *Goal 14*: 10 target, melestarikan dan menggunakan samudra, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan; (15) *Goal 15*: 12 target, melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati; (16) *Goal 16*: 12 target, mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; (17) *Goal 17*: 19 target, memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Anak muda sebagai hasil bonus demografi harus belajar membangun kemitraan positif. Pengembangan super tim harus menjadi acuan proses pembangunan di Indonesia. Persahabatan antarnegara diarahkan untuk membangun kesempatan kerja bagi bonus yang besar menuju pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama global perlu diarahkan pada tujuan menyerap potensi tenaga kerja yang melimpah. Pada tahun 2017 penduduk dunia mencapai 8 miliar, padahal idealnya bumi hanya mampu menampung 3-4 miliar, maka akan timbul ketimpangan akibat kemiskinan dan kesehatan, konflik perebutan sumber daya, dan kelangkaan energi. Konflik antarpenduduk dan antaretnis telah menyebabkan migrasi besar-besaran dari Suriah ke Eropa, daerah Timur Tengah ke Asia dan Australia yang menimbulkan permasalahan tersendiri. Dibutuhkan inovasi yang cerdas dan kreativitas baru untuk penduduk bumi tinggal di planet lain.

35. Demografi dengan Pengaruh Lingkungan Regional

BPS melaporkan berdasarkan data Susenas 2014-2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa, merupakan negara yang mempunyai penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Posisi Indonesia yang berada di kawasan Asia, selain memiliki penduduk yang besar, juga memiliki SKA yang cukup bisa diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam konteks permasalahan kependudukan, Indonesia memang tidak sendiri menghadapi masalah kependudukan, karena tujuh dari sepuluh penduduk terpadat di dunia berada di Asia. Namun demikian, ada hal yang menguntungkan (berpeluang untuk berhasil) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, karena program tersebut pernah sukses pada pemerintahan orde baru, yaitu program Keluarga Berencana (KB), dan sampai sekarang masyarakat masih bisa menerima dan mendukung program KB tersebut.

Bila kita mau belajar dari sejarah, di mana pemerintah Tiongkok (sebelumnya bernama Cina) pada tahun 1970 pernah belajar dari Indonesia tentang program KB yang dinilai berhasil dalam menekan angka kelahiran. Seharusnya kita bangga sebagai negara percontohan di mana Tiongkok menilai program KB yang mereka lakukan saat ini dinilai berhasil adalah hasil dari belajar dari Indonesia. Pemerintah Tiongkok telah menetapkan suatu kebijakan tentang perlunya pengendalian angka kelahiran karena apabila jumlah penduduk tidak terbatas, pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam.

Ternyata setelah 30 tahun pemerintah Tiongkok melaksanakan program kependudukan, telah berhasil mengendalikan angka kelahiran di negaranya, dan program kependudukan ini memberikan kontribusi terhadap program pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Keseriusan pemerintah Tiongkok dalam memajukan program KB sangat terlihat jelas dengan dibangunnya sejumlah sarana dan teknologi yang

mendukung, disertai dengan tidak henti-hentinya melakukan kampanye yaitu “Satu Keluarga Satu Anak” (*One Family One Child*).

Negara tetangga Tiongkok, yaitu Taiwan pada tahun 2011 telah berhasil menurunkan angka kelahiran terendah di dunia, yaitu sebesar 0,94% jauh di bawah angka rata-rata dunia 2,1% yang merupakan *replacement level*. Walau jumlah penduduk Singapura dan Taiwan belum menurun, mereka telah dipusingkan dengan masalah kekurangan tenaga kerja muda dan peledakan jumlah penduduk lansia. Namun Singapura amat cepat menyelesaikan transisi demografinya, meskipun saat ini masih menghadapi masalah ledakan jumlah penduduk lansia.

Sementara itu, dengan jumlah penduduk yang banyak telah berkontribusi terhadap besarnya Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga Indonesia masuk G-18, bahkan tahun 2016 Indonesia diundang ke pertemuan G-8. Hal ini menunjukkan demografi Indonesia menghasilkan PDB yang tinggi dan kepemimpinan yang diakui dunia.

Peran kepemimpinan Indonesia di kawasan regional sangat baik, melalui organisasi regional seperti ASEAN, AFTA, dan organisasi Pasifik lainnya menunjukkan Indonesia disegani di kawasan ini. Dengan jumlah penduduk yang banyak, GDP yang besar, Indonesia dituntut untuk menjadi negara bangsa yang besar, kuat, dan disegani di kawasan regional.

BAB VI

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, telah berjalan dalam kurun waktu yang sangat lama, tetapi perhatian manusia pada pengetahuan kependudukan baru dimulai pada tahun 1662.

Ada keterkaitan antara sejarah kependudukan di Eropa dengan negara-negara di Asia termasuk Indonesia, yang paling utama adalah pada perubahan angka pertumbuhan penduduk.

Kita semua harus turut bertanggung jawab atas pertumbuhan penduduk yang relatif cepat itu, begitu pula dalam membatasi kelahiran untuk meminimalisir keadaan yang sering terjadi, di antaranya kematian ibu atau bayi saat proses melahirkan. Kita wajib memberikan masukan-masukan yang positif dan memberi informasi pada masyarakat tentang pentingnya memelihara kesehatan dan harus ada kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi terkait dengan masalah kependudukan.

Indonesia dengan penduduk saat ini lebih dari 254,9 juta jiwa, dengan wilayah yang terdiri dari kepulauan serta laju pertumbuhan penduduk yang berbeda-beda, telah melahirkan dinamika migrasi yang khas. Pola migrasi yang ada sangat menarik untuk dikaji. Faktor-faktor penyebab, baik faktor pendorong maupun faktor penarik timbulnya migrasi tumbuh dalam kompleksitas yang meningkat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masalah kependudukan di Indonesia merupakan masalah yang menuntut penyelesaian dengan segera.

Ketidakmerataan persebaran penduduk di Indonesia sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini akan selalu berhadapan dengan berbagai hambatan dan keterbatasan, sehingga tidak dengan mudah dapat dilaksanakan. Untuk hal ini Indonesia membutuhkan calon-calon pimpinan tingkat nasional yang cerdas, selalu berpikir secara komprehensif, holistik, dan integral dalam setiap kebijakan yang akan diputuskan.

Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo Sri Moertiningsih, Samosir Omas Bulan. 2011. *Dasar-Dasar Demografi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Ananta Aris, Lembaga Demografi FEUI. 1995. *Transisi Demografi, Transisi Pendidikan dan Transisi Kesehatan di Indonesia*. Kantor Menteri Kependudukan Republik Indonesia/BKKBN.
- Dwiyanto Agus. *Kebijakan Kependudukan*. Pusat Kependudukan Universitas Gajah Mada (www.wonderwahtbiz).
- Harmadi Sonny Harry B., Handayani Dwini, Hidayat Zainul, Saputra Muda, Mariun Badrun N. 2011. *Pembangunan Berwawasan Kependudukan*. BKKBN dan LD FEUI.
- Jalal Fasli. 26 November 2014. *Paparan Pembangunan Berwawasan Kependudukan*. Bandung: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2012. *Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035*.
- Mantra Ida Bagoes. 2013. *Demografi Umum*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli Said., 2014. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: LP3ES.
- Smith, Laurence C. 2011. *The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future*. New York: A Plume Book.
- The World Bank. 2009. *Reshaping Economy Geography*. Washington DC.